

**EFEKTIVITAS PENERAPAN
SISTEM INFORMASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

(Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SATRIA AGUNG CAHYA
135030107113014**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala Rahmad dan Ridho ALLAH SWT

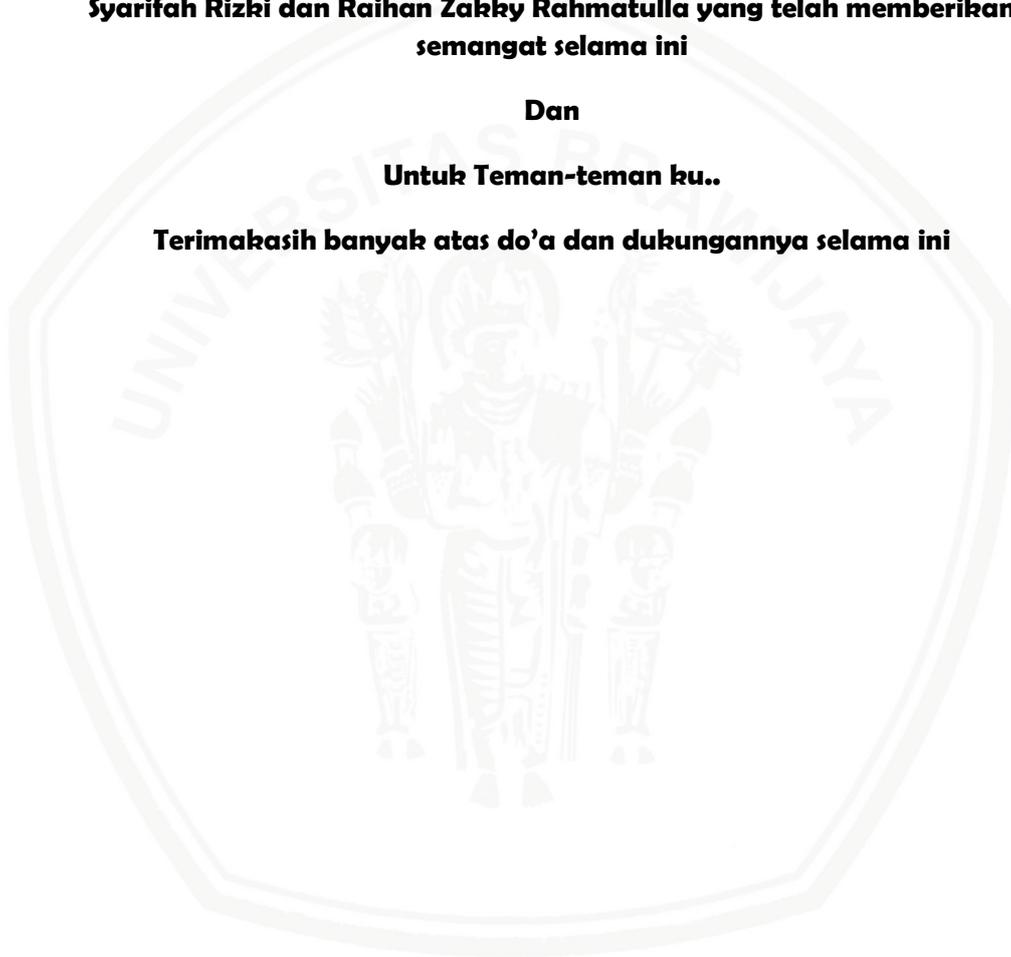
Untuk kedua Orang tua Papa Sufianto dan Mama Endang Riskina yang selalu memberikan motivasi dan menemani selama ini

Untuk kakak perempuan saya Melda Novika Sari dan adik-adik saya Jihan Syarifah Rizki dan Raihan Zakky Rahmatulla yang telah memberikan semangat selama ini

Dan

Untuk Teman-teman ku..

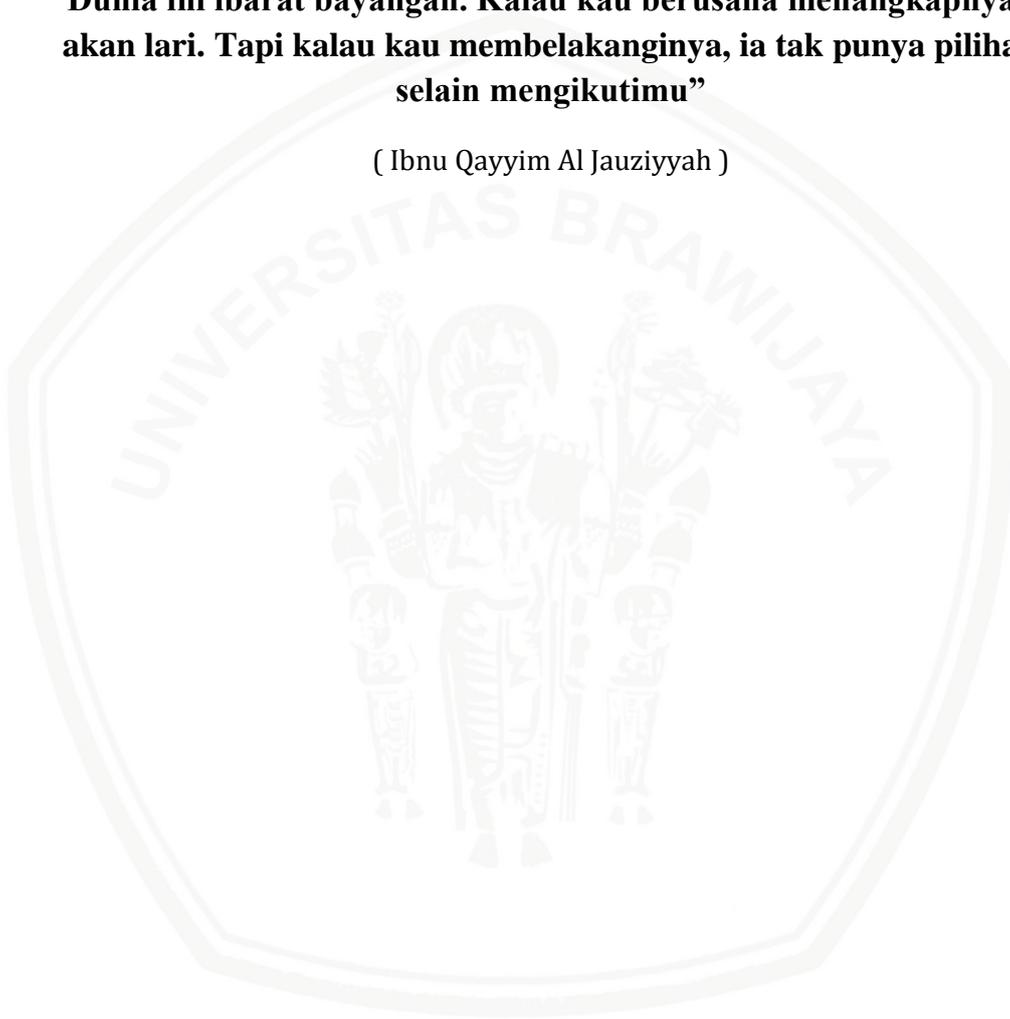
Terimakasih banyak atas do'a dan dukungannya selama ini



MOTTO

“ Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten
Sumenep)

Disusun oleh : Satria Agung Cahya

NIM : 135030107113014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 6 Juni 2018

Komisi Pembimbing
Ketua

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Nurjati Widodo, S.AP., M.AP
NIP. 2012018301291001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juli 2018
Jam : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi atas Nama : Satria Agung Cahya
Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
(Studi Pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)

Dan dinyatakan LULUS

Malang, 19 Juli 2018

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Anggota

Nuriati Widodo, S.AP., M.AP
NIP. 2012018301291001

Anggota

Nana Abdul Aziz, S.AP., M.AP
NIP. 19840713 2015 04 1004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya terima (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 6 Juni 2018
Mahasiswa



Satria Agung Cahya

135030107113014

RINGKASAN

Satria Agung Cahya, 2018. **Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)**, Drs. Abdul Wachid, M.AP; Nurjati Widodo, S.AP,. M.AP. 105 Hal + xiii.

Pemerintah dapat mengambil langkah meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintah dengan menggunakan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep, dan untuk menganalisis faktor penghambat serta faktor pendukung dari penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini dilakukan di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep yang berlokasi di jalan Dr. Cipto No. 33 Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang perlu diperhatikan. Indikator efektivitas sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang telah dicapai oleh Kantor LPSE Kabupaten Sumenep setelah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi yaitu berupa keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi *illegal acces* dan kerusakan pada sistem, kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem, tingkat pencatatan dan perhitungan informasi, kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem, relevansi yang menunjukkan kesesuai dan manfaat laporan yang dihasilkan, ketercapain sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Penulis memberikan saran perlunya penambahan *bandwidth* untuk mencegah apabila akses ke situs LPSE Kabupaten Sumenep mengalami kesulitan (traffic jam) dan meningkatkan versi aplikasi SPSE ke versi 4.2 untuk akses yang lebih optimal., perlunya penugasan pegawai LPSE Sumenep untuk mengikuti Management Training Administrasi System yang diselenggarakan oleh LKPP.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Penerapan, Efektivitas, LPSE.

SUMMARY

Satria Agung Cahya, 2018. **The Effectiveness of Implementation Procurement Information System Goods and Services (Study at LPSE Office of Sumenep Regency)**, Drs. Abdul Wachid, M.AP; Nurjati Widodo, S.AP ., Page 105 + xiii.

The government could taking a step improve public service with the implementation of the government by using the exchequer spent through a process government goods and services procurement. This reseach aims to now effectiveness system information implementation procurement goods and services in LPSE offices Sumenep regency, to now to analyze obstacle factors and supporting factors from implementation system information procurement goods and services based on technology information office LPSE Sumenep.

This research did in LPSE Office of Sumenep Regency, That is located in at Dr. Cipto No. 33 Sumenep Regency. The care of this research that is used is descriptive research by qualitative approach. The Sources of data that is used is primary data and secondary data which is got from collecting data methods that is observation, interview and documentation.

This on research that has been done, the results obtained that effectiveness implementation of information systems procurement goods and services at LPSE office Sumenep Regency has experienced a fairly good development. In the application of information systems procurement of goods and services at LPSE offices Sumenep Regency there are inhibiting factors and supporting factors to note. Indicators of effectiveness of information system of procurement of goods and services that have been achieved by LPSE Office of Sumenep Regency after applying technology based information system that is in the form of data security, system capability in overcoming *illegal acces* and damage to system, speed and accuracy of information in system usage, calculation of information, completeness of information content generated by the system, the relevance indicating the conformity and benefits of the resulting report, ketercapain system in accordance with the objectives of the establishment of the procurement policy of goods and services.

Writer give advice the need for the addition of the bandwidth to prevent access to the site when lpse kabupaten sumenep experienced difficulty (traffic hours) and increase the program version spse 4.2 to access to private . The assignment, the need to employees lpse sumenep to follow management training administration system which diselenggarakan by LKPP.

Keywords: Procurement Information System, Application, Effectiveness, LPSE

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan kesehatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti tidak jarang mengalami berbagai kendala dengan proses yang panjang dalam penyelesaiannya. Namun, kendala tersebut dapat terselesaikan dengan adanya bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. Fadilah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. I Gede Eko Putra Sri Senantu, S.AP., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Drs. Abdul Wachid, M.AP, selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Nurjati Widodo, S.AP., M.AP, selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kepada peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

8. Indah Nur Wahyuni, S.AB, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah selama proses menyelesaikan skripsi, terimakasih atas semangat, dukungan, doa serta waktu yang diluangkan untuk peneliti.
9. Bapak Fariz Aulia Utomo, S.STP, M.Si selaku Ketua LPSE Kabupaten Sumenep yang telah membantu memberi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman satu kontrakan dan teman-teman Administrasi Publik angkatan 2013 terimakasih atas dukungan serta bantuan selama mengerjakan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 6 Juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Administrasi Publik.....	10
1. Definisi Administrasi Publik.....	10
2. Paradigma Administrasi Publik.....	11
B. <i>E-Government</i>	17
1. Definisi <i>E-Government</i>	17
2. Manfaat dan Fungsi <i>E-Government</i>	18
3. Struktur Pengembangan <i>E-Goverment</i>	21
4. Tipe Relasi <i>E-Government</i>	22
5. Jenis-jenis Pelayanan <i>E-Goverment</i>	27
C. Efektivitas	29
1. Definisi Efektivitas.....	29
2. Indikator Efektivitas Sistem Informasi	30
3. Tahapan Efektivitas.....	31

D.	Sistem Informasi	34
1.	Definisi Sistem	34
2.	Definisi Informasi	35
3.	Definisi Sistem Informasi	36
E.	Pengadaan Barang dan Jasa	37
1.	Definisi Pengadaan Barang dan Jasa.....	37
2.	Fungsi Pengadaan	38
3.	Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.....	39
4.	Metode <i>Procurement</i> (Pengadaan Barang)	42
5.	Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa	43
BAB III METODE PENELITIAN		45
A.	Jenis Penelitian.....	45
B.	Fokus Penelitian.....	46
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	47
D.	Jenis dan Sumber Data	48
E.	Tenik Pengumpulan Data.....	49
F.	Instrumen Penelitian.....	50
G.	Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
2.	Gambaran Umum Situs Penelitian	57
a.	Visi dan Misi LPSE Kabupaten Sumenep	59
b.	Struktur Organisasi	59
c.	Pengoperasian Sistem SPSE	61
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian.....	75
1.	Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep	75
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep	82
C.	Analisis Data	87
1.	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep	87

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.....	91
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
Gambar 1	Siklus Informasi	36
Gambar 2	Definisi Sistem Informasi	37
Gambar 3	Tahapan Analisis Data Model Spradley	52
Gambar 4	<i>Website</i> resmi LPSE Kabupaten Sumenep	58
Gambar 5	Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Sumenep	60
Gambar 6	<i>User Interface</i> Halaman Pendaftaran <i>User Id</i>	61
Gambar 7	<i>User Interface</i> Halaman Pendaftaran <i>E-mail</i>	62
Gambar 8	<i>User Interface</i> Halaman Konfirmasi <i>E-mail</i>	63
Gambar 9	<i>User Interface</i> Halaman <i>E-mail</i>	63
Gambar 10	<i>User Interface</i> Halaman Pengisian Pendaftaran <i>Online</i>	64
Gambar 11	<i>User Interface</i> Halaman Pendaftaran Sukses	66
Gambar 12	<i>User Interface</i> Halaman <i>E-mail</i>	67
Gambar 13	<i>User Interface</i> Halaman Aktivasi	68
Gambar 14	<i>User Interface</i> Halaman Aktivasi Berhasil	68
Gambar 15	<i>User Interface</i> Halaman Aktivasi Penyedia	69
Gambar 16	<i>User Interface</i> Halaman Nonaktifkan <i>User Id</i>	70
Gambar 17	<i>User Interface</i> Aktivasi Penyedia dengan <i>User Id</i> sama	70
Gambar 18	<i>User Interface</i> Halaman <i>Home</i>	71
Gambar 19	<i>User Interface</i> Halaman Menu Data Penyedia	72
Gambar 20	<i>User Interface</i> Halaman Menu Lelang Baru	72
Gambar 21	<i>User Interface</i> Halaman Menu <i>Inbox</i>	73
Gambar 22	<i>User Interface</i> Halaman Menu Log Akses	74
Gambar 23	<i>User Interface</i> Halaman Menu Ganti <i>Password</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan, bertambah canggih dan kompleks seiring dengan berjalannya waktu membuat manusia sebagai pemilik dan pemakai teknologi harus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dibidang teknologi agar sesuai dengan apa yang di harapkan. Perkembangan sistem informasi yang semakin pesat dan masyarakat modern dikenal sebagai masyarakat informasional, membuat tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak disentuh oleh sebuah informasi. Perkembangan informasi ini telah melahirkan berbagai sistem informasi yang saling berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan operasional sehari-hari pada suatu instansi. Sistem informasi adalah sekelompok elemen-elemen dalam suatu organisasi yang saling berintegrasi dengan menggunakan masukan, proses dan keluaran dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang tepat (Whitten, 2006:45). Salah satu manfaat yang dapat dirasakan pemerintah dari perkembangan sistem informasi yaitu dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dapat mengambil langkah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dapat terwujud dengan cara yang tepat yaitu menggunakan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan publik baik di dalam pemerintahan maupun perusahaan (swasta) selalu diperlukan barang dan jasa untuk keperluan operasional. Kebutuhan tersebut tidak dapat dihindarkan, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan tetapi diperlukan tenggang waktu. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Tahap awal dari pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat, saat ini pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Berkembang pesatnya teknologi informasi saat ini membuat pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dimana saja dan merupakan kegiatan praktis. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat mengubah data-data yang ada hingga menjadi informasi yang valid, akuntabel, dan transparan. Salah satu instansi yang sudah menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan operasionalnya adalah kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mulai dipersiapkan sejak tahun 2008. Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas (Hardjowijono dan Muhammad : 2008). Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini diciptakan dengan berlandaskan Peraturan

Presiden Pasal 111 No.54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelelangan Barang dan Jasa. Perpres ini mengalami perubahan menjadi Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelelangan Barang dan Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak dilakukan secara manual melainkan secara *online*.

Proses secara elektronik ini merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan berbasis *web/internet*, memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik. Pelaksanaan *e-procurement* merupakan salah satu langkah penting dalam mendukung diberlakukannya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan rancangan perpres mulai tahun 2012 semua lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah wajib dilakukan secara elektronik.

Penerapan Sistem ini merupakan program pemerintah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang merupakan unit yang dibentuk oleh sebuah instansi untuk mengoperasikan sistem *e-procurement* atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) harus diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia, dimana sangat beraneka ragam dengan anggaran yang didapatkan. Kondisi ini menjadi pertimbangan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) dalam mengembangkan sistem e-

procurement. Dasar hukum pembentukan menggunakan Perpres No. 4 tahun 2015 pasal 19 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasional yang diatur oleh Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010 Pasal 2 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sistem pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik dalam pelaksanaannya juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumenep pada saat ini telah memanfaatkan LPSE. Pemanfaat LPSE di Kabupaten Sumenep ini diharapkan dapat mempermudah penyebaran informasi mengenai pelelangan kepada para kontraktor, serta agar lebih transparan dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumenep. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Sumenep guna untuk mendukung proses *monitoring* dan *audit*, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Permasalahan yang sering terjadi pada sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumenep yang dioperasikan melalui LPSE ini masih sering mengalami *error* saat sedang digunakan dalam mengakses informasi ataupun saat mengunggah berkas, sehingga dalam hal ini sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep yang diharapkan dapat berjalan efektif menjadi tidak efektif dalam penggunaannya. Pelayanan

pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan efisien masih sangat perlu untuk dilakukan *maintenance system* secara berkala dalam pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. (Sumber: Wawancara dengan Bapak Rizki Adam, S.H selaku direktur dari CV. Sri Wedari, 2017)

Permasalahan yang dihadapi kontraktor (pelaksana) selaku pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari pra penelitian berdasarkan studi kasus media *online* adalah terkait dengan efektivitas sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep, didukung dengan investigasi yang dilansir oleh Media *Online* Kabar Investigasi (2017) Di Duga Ada Permainan Lelang Tender, Kontraktor Demo Pemkab Sumenep. “Unjuk rasa yang dilakukan oleh para kontraktor yang tergabung dalam Forum Kontraktor Sumenep (FKS) pada tanggal 24 Juli 2017 lalu ini terkait dengan pelelangan proyek yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep terdapat kejanggalan yang berupa isu terkait pemenang tender yang dilelangkan pada website LPSE Kabupaten Sumenep yang mengakibatkan unjuk rasa. Kejanggalan tersebut dirasakan karena tidak adanya keterbukaan dari pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam memberikan informasi kepada para kontraktor di Kabupaten Sumenep. Para kontraktor yang melakukan unjuk rasa ini menduga adanya kerjasama yang tidak jujur dalam

proses pelelangan, dimana hal tersebut bertentangan dengan tujuan dibentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) oleh pemerintah”.

Berita serupa tidak hanya dilansir oleh Media *Online* Kabar Investigasi, akan tetapi beberapa media juga mengangkat berita yang sama yaitu seperti halnya media Jawa Pos Radar Madura, “Forum Kontraktor mengklaim agar lelang proyek dilakukan secara bersih dan terbuka. Mereka menilai proyek yang dilelang ULP Pemkab Sumenep merupakan pesanan, hal itu ditandai dengan dimenangkannya beberapa proyek oleh satu kontraktor. Seperti yang diutarakan oleh salah satu kontraktor yang meminta agar dihilangkan permainan dan monopoli proyek di internal Pemkab Sumenep. Demonstras menuntut agar bupati dan wakil bupati Sumenep mengganti seluruh personel LPSE serta ULP, mereka meminta penegak hukum menindak oknum yang dianggap bermain dalam lelang proyek.” Berita serupa mengenai LPSE Kabupaten Sumenep diperoleh dari investigasi (2017) Forum Kontraktor Sumenep Curiga Proyek Dimonopoli, yang dilansir oleh Jawa Pos Radar Madura.

Fenomena yang terkait dengan efektivitas penerapan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang mengakibatkan sering terjadi *error*, tidak adanya keterbukaan selama proses seleksi pemenang lelang yang dialami para kontraktor sebagai pengguna dalam menggunakan sistem LPSE. Berbeda dengan tujuan dibentuknya sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumenep yang telah berbasis teknologi informasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dalam

aktivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya adalah untuk mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat akademik

Mampu memberikan informasi maupun referensi bagi civitas akademik dan sebagai bahan bacaan dalam pengembangan ilmu seta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan ataupun bahan perbandingan bagi penelitian dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan informasi terhadap instansi penyelenggara pengadaan barang dan jasa sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam penerapan sistem yang lebih baik dan akurat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi gambaran mengenai isi dari masing-masing bab secara berurutan dan saling berkaitan dalam skripsi ini untuk mempermudah pembahasan. Uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti mencantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, baik secara akademis maupun secara praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan pada bab ini menunjuk tentang (1) Konsep Sistem, (2) Konsep Dasar Informasi, (3) Konsep Dasar Sistem Informasi, (4) Konsep pengadaan barang dan jasa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti mencantumkan Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang deskripsi hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dan pembahasan masalah berdasarkan data yang ada dan teori yang dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pemberian saran-saran perbaikan bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi apabila dilihat dari tujuan penyelenggaraan kegiatannya adalah administrasi negara/publik. Istilah "publik" dalam administrasi publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *public*, yang berarti "(masyarakat) umum, rakyat" (Echols dan Saddily dalam Indradi, 2016:102). Administrasi publik adalah administrasi yang menyangkut seluruh rangkaian penyelenggaraan untuk mencapai tujuan kenegaraan (Hutabarat dalam Indradi, 2016: 66-67). Secara khusus, Dimock, Dimock dan Fox dalam Indradi (2016:107) mendefinisikan administrasi publik sebagai produksi barang-barang dan Jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat konsumen. Nigro & Nigro dalam Indradi (2016: 106) mengemukakan beberapa poin pengertian dari administrasi publik, yang mana mereka definisikan sebagai berikut :

- a. Suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
- b. Meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antaranya; mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan pemerintahan, karenanya merupakan bagian dari proses politik;

- c. Berkaitan erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat; dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian administrasi publik adalah serangkaian penyelenggaraan kerja bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan, salah satunya dalam hal produksi barang dan jasa, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan kenegaraan lainnya.

2. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan rumusan-rumusan administrasi publik yang terus diikuti, diperoleh beberapa definisi mengenai administrasi publik. Seseorang memberikan sebuah rumusan, lalu orang lain juga memberikan rumusan tandingan yang tidak kalah pentingnya. Menurut Nicholas Henry dalam Thoha (2011:18), terdapat krisis definisi dalam administrasi publik. Itulah sebabnya Henry menyarankan bahwa untuk memahami lebih jauh tentang administrasi publik, sebaiknya dipahami lewat paradigma. Paradigma dalam administrasi publik amatlah bermanfaat, karena dengan demikian seseorang akan mengetahui tempat di mana bidang ini dipahami tingkatannya yang sekarang ini.

Administrasi publik telah dikembangkan sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigma yang saling tumpang tindih, tiap fase dari paradigma tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan *locus* dan *focus*-nya. *Locus*

mencakup "*where of the field*" atau tempat di mana metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah itu diterapkan. Adapun *focus* mempersoalkan "*what of the field*" atau metode apa yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan (Henry dalam Thoha, 2011: 18).

Berdasarkan *locus* dan *focus* suatu disiplin ilmu, administrasi publik terdiri atas 5 (lima) paradigma, di antaranya sebagai berikut:

a. Paradigma I: *Dikotomi Politik-Administrasi* (1900—1926)

Tonggak sejarah yang dapat dipergunakan sebagai momentum dari fase paradigma pertama ini adalah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, Di dalam bukunya "*Politics and Administration*", Goodnow dalam Thoha (2011: 18—19) berpendapat ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi sebagaimana yang tertulis dalam judul bukunya.

Penekanan Paradigma I ini adalah pada *locus*-nya, yakni mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi publik ini berada. Secara jelas, menurut Goodnow dan rekan-rekannya, administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Sedangkan *focus*-nya adalah pemisahan urusan politik dari urusan administrasi dalam fungsi pokok pemerintah (oleh karena itu disebut sebagai "dikotomi politik-administrasi"), di mana substansi ilmu politik hanya meliputi masalah-masalah politik, pemerintahan, dan kebijakan. Sedangkan substansi administrasi publik ada pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran.

Administrasi publik pada dekade 1920-an mulai mendapatkan legitimasi di kalangan akademisi. Tahun 1926, White juga menerbitkan sebuah buku berjudul *"Introduction to the Study of Public Administration"*. Buku ini adalah buku pertama yang secara keseluruhannya dipersembahkan untuk memperkenalkan administrasi publik, Dwight Waldo pernah mengatakan bahwa buku tersebut merupakan pokok-pokok kemajuan Amerika, dan di dalamnya terdapat beberapa desakan untuk administrasi publik. Desakan-desakan itu antara lain (Waldo dalam Thoha, 2011: 20):

- 1) Politik seharusnya tidak usah mengganggu lagi administrasi;
- 2) Manajemen memberikan sumbangan analisis ilmiahnya terhadap administrasi, administrasi publik mampu menjadikan dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang bernilai bebas (*value-free*); dan
- 3) Misi dari ilmu administrasi adalah ekonomis dan efisiensi.

b. Paradigma II: *Prinsip-prinsip Administrasi* (1927—1937)

Tahun 1927, W. F. Willoughby menerbitkan bukunya yang berjudul *"Principles of public Administration"*. Prinsip-prinsip administrasi publik yang terdapat pada buku tersebut memberikan indikasi terhadap tren baru dari perkembangan bidang ini. Fase paradigma kedua ini, administrasi publik benar-benar mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an, administrasi banyak mendapat sumbangan yang berharga dari bidang-bidang lainnya seperti industri dan pemerintahan. Dengan demikian, pengembangan pengetahuan manajemen memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya prinsip-prinsip administrasi tersebut. Sebab *locus* dari paradigma

ini mudah diketahui yakni berada pada esensi prinsip-prinsip tersebut (Thoha, 2011:21). Prinsip-prinsip administrasi publik yang dimaksudkan tersebut ialah adanya suatu kenyataan, bahwa administrasi publik bisa terjadi pada semua tatanan administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, atau kerangka institusi. Administrasi publik bisa diterapkan dan diikuti di bidang apa pun tanpa terkecuali (Thoha, 2011: 22).

Tahun 1937 merupakan puncak akhir dan fase paradigma kedua ini. Luther H. Gullick dan Lyndall Urwick dalam tulisannya "*Paper on the Science of Administration*", mengemukakan bahwa prinsip adalah amat penting bagi administrasi sebagai suatu ilmu (Thoha, 2011:23). Prinsip administrasi yang terkenal dari Gullick dan Urwick ialah POSDCORB, yang mana singkatan dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (pengadaan tenaga kerja), *Directing* (pemberian bimbingan), *Coordinating* (pengoordinasian), *Reporting* (pelaporan), dan *Budgeting* (penganggaran).

c. Paradigma III, *Administrasi Publik sebagai Ilmu politik* (1950—1970)

Kritikan yang ditujukan kepada konsepsi administrasi publik pada waktu itu, maka akhirnya bidang ini melakukan lompatan ke belakang menemui "orang tua" disiplin ini yakni ilmu politik, Akibat dari lompatan itu jugalah terjadi perubahan dan pembaruan definisi *locus*-nya yaitu birokrasi pemerintahan, dan kekurangan hubungan dengan *focus*-nya. Singkatnya, fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi publik dengan ilmu politik (Thoha,

2011: 27). Konsekuensi dari usaha ini ialah kewajiban untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan *focus* keahliannya yang esensial, itulah sebabnya tulisan-tulisan administrasi publik di dekade 1950-an penekanan pembicaraannya berada pada wilayah kepentingan (*area of interest*) atau sebagai sinonim dari ilmu politik.

Usaha untuk kembali kepada ilmu politik sebagai suatu identifikasi dari administrasi publik pada paradigma ini, akan tetapi sebaliknya ilmu politik mulai tidak memedulikannya. Tahun 1962 administrasi bukan lagi dianggap sebagai bagian dari ilmu politik. Survei yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ilmu politik pada tahun 1964, menunjukkan bahwa minat terhadap administrasi publik dalam fakultas-fakultas ilmu politik mulai merosot (Thoha, 2011: 27). Melihat perlakuan ilmu politik terhadap administrasi tersebut, pada tahun 1968 Waldo memprotes keadaan seperti itu. Dia berpendapat bahwa sarjana-sarjana ilmu politik yang tidak lagi mengidentifikasi dirinya dengan administrasi publik adalah sikap yang tidak memedulikan dan bahkan memusuhi. Para sarjana administrasi publik pun merasa tidak senang dan dianggap sebagai warga negara kelas dua (Waldo dalam Thoha, 2011: 28).

d. Paradigma IV, *Administrasi publik sebagai ilmu Administrasi* (1956-1970)

Paradigma 4 ini waktunya berada dalam kurun waktu paradigma ke-3. Paradigma 4 timbul dikarenakan sarjana-sarjana administrasi publik dianggap sebagai warga negara kelas dua dari ilmu politik. Oleh karena itu, mereka mencari alternatif pemecahannya, dan jalan yang dipilih ialah kembali bahwa

administrasi publik adalah ilmu administrasi. Para fase paradigma keempat ini, ilmu administrasi hanya memberikan *focus*, tetapi tidak pada *locus*-nya. Ia menawarkan teknik-teknik yang canggih serta memerlukan keahlian dan spesialisasi (Thoha, 2011: 28-29). Sejumlah usaha-usaha pengembangan mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi ini. Di tahun 1956 terbitlah jurnal "*Administrative Science Quarterly*" yang menjadi sarana untuk menyuarakan publik Keith M. Anderson berpendapat di tahun 1960 bahwa teori organisasi seharusnya menjadi fokus utama dari administrasi publik. Demikian pula, tidak bisa dilupakan begitu saja usaha-usaha yang dirintis oleh para cendekiawan terdahulu, seperti James G. March dan Herbert A. Simon dalam buku mereka berdua, "*Organizations*" (1958), Richard Cyert dan March dalam "*A Behavioral Theory of Firm*" (1963), serta March dalam "*Handbook of Organization*" (1965). Kesemuanya itu telah memberikan alasan teoretis yang kuat dalam memilih administrasi sebagai paradigma administrasi publik (Thoha, 2011 : 29).

e. Paradigma V, *Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik* (1970)

Pembaruan dalam tahap paradigma kelima ini, *Locus* administrasi publik tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi. Dua setengah dekade terakhir, perhatian pada teori organisasi ditujukan terutama pada bagaimana dan mengapa organisasi-organisasi itu bekerja, bagaimana dan mengapa orang-orang berperilaku dalam organisasi demikian pula bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Pertimbangan yang menggunakan teknik-teknik ilmu manajemen ke dalam

lingkungan pemerintahan juga menjadi perhatian dalam fase paradigma kelima ini (Thoha, 2011: 31).

Tren yang diikuti oleh paradigma ini, jika dilihat maka akan didapat *focus* administrasi publik yaitu teori organisasi, praktik dalam analisis *public policy*, serta teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. *Locus* normatif dari administrasi publik yang digambarkan oleh paradigma ini ialah pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*).

B. *E-Government*

1. Definisi *E-Government*

E-government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Berbagai negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan *e-government* dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negara (Indrajit dkk., 2002:3). Sebelum membahas lebih jauh konsep *e-government*, tentu harus dipahami terlebih dahulu apa definisi dari *e-government* itu sendiri.

Lembaga non pemerintah seperti *The World Bank Group* dalam Indrajit dkk, (2002: 3) mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

"*E-Government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet, dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk

hubungan dengan warga negara, bisnis, dan organisasi lain dalam pemerintahan."

Ahli lain juga memberikan pendapat seperti Zweers & Planque dalam Indrajit dkk (2002:3) mendefinisikan *e-government* sebagai sesuatu yang "berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan".

Definisi *e-government* yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi modern (biasanya berupa internet) oleh organisasi pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bagi institusi dan lembaga pemerintahan, serta menyediakan akses yang mudah dalam hal pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat, perusahaan swasta, dan organisasi lain dalam suatu negara.

2. Manfaat dan Fungsi *E-Government*

E-government merupakan sistem manajemen pemerintahan untuk pelayanan pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, *E-government* memiliki dua fungsi, yaitu (Akadun, 2009:134):

- a. Sarana memperbaiki manajemen internal, sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk *decision supporting system* atau *executive information system*; dan

- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi (pengotomatisan) pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

Pengembangan *e-government* juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut (Akadun, 2009: 136) :

- a. Pelayanan jasa lebih baik kepada masyarakat. Informasi disediakan 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor dan rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintah selama terdapat jaringan internet.
- b. Peningkatan hubungan antar pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan diharapkan dapat merubah hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, karena keterbukaan ini diharapkan dapat menghilangkan adanya rasa curiga dan kekesalan dari semua pihak terhadap pemerintah.
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi mudah diperoleh. Contohnya profil suatu daerah yang ditampilkan secara *online* dengan berbagai keunggulannya dan kebutuhannya dapat memberikan peluang bisnis bagi masyarakat daerah lain tanpa harus mendatangi daerah yang bersangkutan
- d. Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Misalnya sosialisasi berbagai produk pemerintah kabupaten kepada seluruh aparatur akan lebih murah manakala dilakukan secara *online* tanpa harus mengumpulkan seluruh aparat pemerintah kabupaten.

- e. Bagi pemerintah, pembuatan surat-surat dan dokumen penting akan lebih mudah dan cepat, pencatatan kompetensi pendidik, pelaksanaan pemerintahan lebih efisien, serta pelacakan data dan informasi seseorang dapat lebih mudah dilaksanakan.

Penerapan konsep *e-government* juga memiliki beberapa manfaat bagi suatu negara. Manfaat *e-government* bagi suatu negara menurut pendapat Al Gore (Wakil Presiden ke 45 Amerika Serikat) dan Tony Blair (Perdana Menteri Britania Raya 1997-2007) sebagai berikut (Indrajit, 2002: 18-19) :

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada; serta;

- e. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi *e-government* yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan dan mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

3. Struktur Pengembangan *E-Government*

Menjamin suatu keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-government* pada setiap instansi harus berorientasi pada lima lapis struktur di bawah ini (Akadun, 2009: 142) :

- a. Akses, yaitu jarmgan komunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.
- b. Portal Pelayanan Publik, yaitu situs-situs internet penyedia pelayanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi terkait.

- c. Sumber Daya Manusia Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, yaitu pegawai yang mampu membangun sistem pengelolaan dan pengolahan informasi, mengoperasikan, serta memperbaiki sistem dan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan informasi manakala terjadi kerusakan.
- d. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi, yaitu organisasi pendukung (*back-office*) yang mengelola, menyediakan, dan mengolah transaksi informasi dan dokumentasi elektronik.
- e. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua sarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi.

Kelima struktur di atas dapat berhasil manakala ditunjang oleh empat pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, serta pemapanan peraturan dan perundang-undangan (Akadun, 2009: 143).

4. Tipe Relasi *E-Government*

E-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain, *e-government* diharapkan mampu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan, dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan bisnis, serta hubungan antar pemerintah. Oleh karena itu, dalam konsep *e-government* dikenal empat jenis relasi, di antaranya sebagai berikut (Indrajit, 2002: 60-65) :

a. *Government to Citizens (G2C)*

Tipe G2C ini merupakan aplikasi *e-government* yang paling umum, yaitu di mana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat), dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-government* bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke samsat dan antre untuk memperoleh pelayanan.
- 2) Kementerian Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai.

b. *Government to Business (G2B)*

Tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entitas bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entitas berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak sara bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi *e-government* berjenis G2B ini adalah sebagai berikut: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis *web* untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui *website* (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR atau *Term of Reference* (dikenal dengan istilah *aanwijzing* oleh para pelaku pengadaan barang/jasa di Indonesia), sampai dengan mekanisme

pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender.

Proses pengadaan dan pembehan barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk *back-office* dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam *e-procurement* diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para *supplier*-nya).

c. *Government to Governments (G2G)*

Era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbaur diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antara negara dan kerjasama antar entitas-entitas negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan *e-government* bertipe G2G ini yang telah dikenal luas dalam hal sebagai berikut.

- 1) Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

- 2) Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya.

d. *Government to Employees (G2E)*

Aplikasi *e-government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G2E ini di antaranya sebagai berikut:

Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan. Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya. Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe relasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh sebuah negara. Keberadaannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan

pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri.

5. Jenis-jenis Pelayanan *E-Government*

Implementasi yang terjadi dapat dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya melalui *e-government*. Salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan tersebut adalah dengan melihatnya dari dua aspek utama (Indrajit, 2002: 47):

- a. Aspek kompleksitas, yaitu yang menyangkut beberapa rumit anatomi sebuah aplikasi *e-government* yang ingin dibangun dan diterapkan; dan
- b. Aspek manfaat, yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya.

Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek *e-government* dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu *publish*, *Interact*, dan *Transact* (Indrajit, 2002: 47-51).

a. *Publish*

Publish merupakan implementasi *e-government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Komunikasi yang timbul dalam kelas ini adalah satu arah, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Contoh aplikasi *e-government* di dalam kelas ini adalah sebagai berikut: Masyarakat dapat melihat dan mengunduh (*download*)

berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung). Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan.

b. *Interact*

Kelas *Interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah bentuk portal di mana situs terkait memberikan fasilitas *searching* bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui *e-mail*, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya). Contoh implementasinya adalah sebagai berikut: Rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui *e-mail* atau *mailing list* tertentu. Mahasiswa dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya

jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah.

c. *Transact*

Kelas *transact* ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan (*transfer*) uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut.

- 1) Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet.
- 2) Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara *online* melalui internet.
- 3) Melalui aplikasi *e-procurement*, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara *online* melalui internet.

C. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu proses yang dikerjakan dengan hasil akhirnya tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini juga dapat diukur melalui seseorang yang melakukan suatu *output* atau keluaran sesuai yang di harapkan. Efektivitas adalah pekerjaan yang diselesaikan dengan perencanaan yang baik, biaya yang efisien dan waktu yang tepat.

Menurut Echols dalam kamus inggris-indonesia (1976:206) efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil atau ditaati. Sehingga kesimpulannya efektivitas adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan mempertimbangkan aspek perencanaan, biaya maupun waktu dalam mencapai suatu tujuan yang telah dikehendaki.

2. Indikator Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas sendiri mempunyai target untuk pencapaiannya. Keberhasilan efektivitas sistem informasi ini juga harus melihat dari indikator-indikatornya. Indikator ini mencakup berbagai macam yang harus diperhatikan dalam efektivitas sistem informasi. Menurut Bodnar (2000:700) menjabarkan indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Indikator keamanan data berhubungan dengan pencegahan bencana, baik bencana alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
- b. Indikator waktu berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.

- c. Indikator ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada *volume* data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan.
- d. Indikator variasi laporan atau output berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
- e. Indikator relevansi menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Indikator relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

3. Tahapan Efektivitas

Keberhasilan suatu efektivitas juga memerlukan sebuah proses. Proses ini merupakan tahapan awal yang berkaitan dengan *input*, proses, hingga *output* yang dihasilkan dalam efektivitas. Menurut Martani dan Lubis (1987:55) ada tiga pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektivitas organisasi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk

- memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan Proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 - c. Pendekatan Sasaran (*goal approach*) dimana pusat perhatian pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil *output* yang sesuai dengan rencana.

Efektivitas organisasi juga bisa dilihat dari beberapa kriteria seperti yang dikemukakan (Sedarmayanti, 2009:60) antara lain:

a. *Input*

Input merupakan sesuatu yang dimasukkan kedalam sistem. *input* sendiri biasanya dapat berupa pembiayaan (kebutuhan dana atau uang), pengelolaan (sumber daya yang digunakan), sarana dan prasarana (fasilitas fisik) seperti dokumen-dokumen, data-data, peralatan penunjang, dan material yang nantinya dapat diolah menjadi sebuah informasi. Di dalam *input* sarana dan prasarana ini sangat penting dimana bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berbasis internet yang dapat di akses melalui *website*. Biasanya di dalam *input* ini lebih mengedepankan sebuah efisiensi.

b. Proses produksi

Proses produksi ini biasanya diukur melalui hasil yang hendak dicapai. Biasanya proses produksi ini lebih menekankan pada kualitas hasilnya. dimana hasil yang baik dapat menunjukkan efektivitas yang baik. Dalam

proses produksi ini harus terdapat interaksi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Di dalam proses ini perlunya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat paham terkait sistem informasi *monitoring* penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Jawa Timur. sehingga masyarakat semakin berkembang dan memiliki pola pikir yang modern. Dalam proses produksi ini apabila dilihat dari segi sistem maka dapat juga mengimplementasikan penggunaan sistem. Selain itu sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai penggerak dan pelaksana dalam mengolah informasi.

c. Hasil (*output*)

Hasil/*output* merupakan sebuah keluaran yang memiliki nilai juga kualitas. Biasanya *output* ini dapat diukur melalui tingkat kepuasan. Di dalam *output* lebih menekankan pada efektivitas. Apabila dalam bentuk barang dapat dilihat melalui produk dan apabila jasa bisa dilihat melalui pelayanan yang baik/prima. Apabila hasil ini sudah sesuai tujuan atau sasaran yang diinginkan maka dapat dikatakan efektif. *Output* yang dihasilkan oleh sistem salah satunya bisa berupa daftar tabel dan daftar gambar/grafik sesuai kebutuhan informasi.

d. Produktivitas

Produktivitas merupakan sebuah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dengan membandingkan keduanya antara *output* yaitu lebih kepada efektifitas dalam pencapaian target sesuai tujuan yang diinginkan. *Input* yaitu lebih kepada efisiensi yaitu dengan

menggunakan sumber daya yang minim tapi berkualitas sehingga menghasilkan *output* yang baik. Produktivitas ini dinilai dari bentuk kepuasan pelanggan, sehingga tingkat kepuasan sangat diperhatikan dalam sebuah produktivitas apakah sudah berjalan dengan baik atau masih belum optimal.

Pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diukur melalui beberapa pendekatan. Dalam pendekatan tersebut terdapat *input*, proses, dan *output*. Dimana efektivitas ini lebih mengutamakan kepada hasil atau *output*. Kualitas pada *inputnya* seperti sarana dan prasarana yang digunakan juga meliputi sumber daya yang dimiliki.

D. Sistem Informasi

1. Definisi Sistem

Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan (Ladjamudin, 2005:3). Elemen tersebut dapat berupa organisasi, orang atau benda yang melakukan suatu pekerjaan. Masing-masing elemen melakukan pekerjaan yang berbeda, dimana pekerjaan tersebut merupakan tujuan bersama dari masing-masing elemen. Menurut Davis 1985 (ladjamudin, 2005:2), sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran.

Sistem dapat diartikan sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima

input serta menghasilkan *ouput* dalam proses transformasi yang teratur (Mulyanto, 2009: 2).

Definisi sistem yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

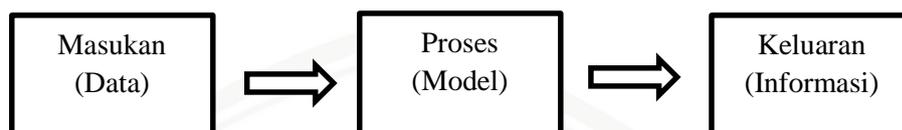
2. Definisi Informasi

Informasi memiliki peranan yang penting dalam organisasi ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan sulit berkembang bahkan dapat menjadi mati. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata dari tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Untuk pengambilan keputusan bagi manajemen, maka faktor-faktor tersebut harus diolah lebih lanjut untuk menjadi suatu informasi (Ladjamudin, 2005 :8).

Informasi adalah data yang telah diklarifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Sutabri, 2005:23). Gordon B. Davis mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang (Mulyanto, 2009 : 17).

Definisi informasi menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bawah informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan

suatu keputusan. Untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi penerimanya, perlu dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan dalam menghasilkan informasi. Menurut Ladjamudin, siklus informasi atau siklus pengolahan data adalah sebagai berikut :



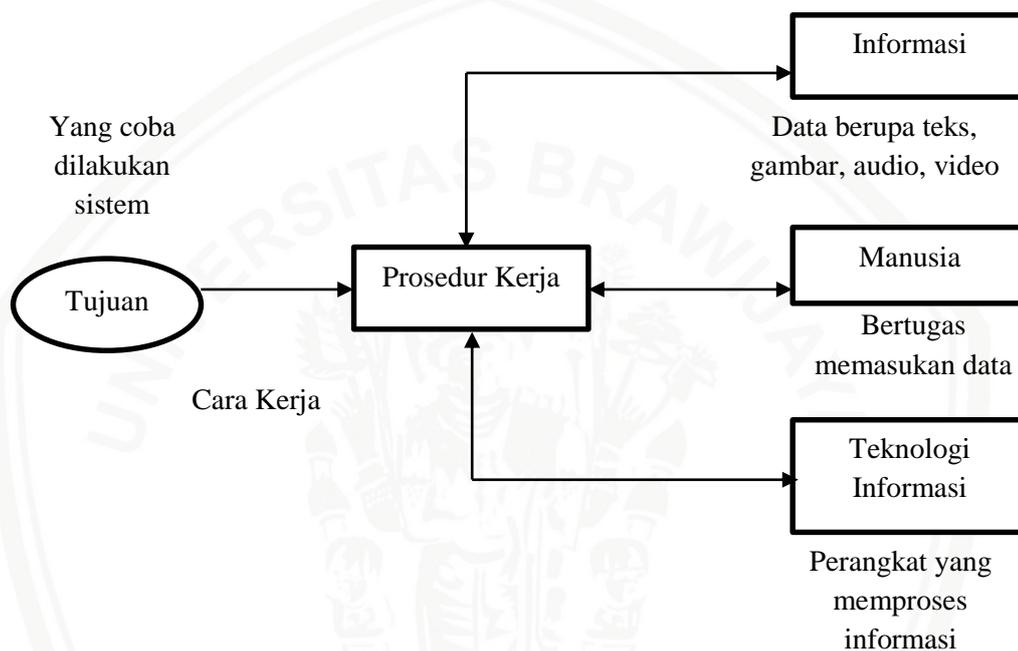
Gambar 1 Siklus Informasi
(Sumber: Ladjamudin, 2005 :11)

3. Definisi Sistem Informasi

Definisi sistem informasi adalah sekelompok elemen-elemen dalam suatu organisasi yang saling berintegrasi dengan menggunakan masukan, proses dan keluaran dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang tepat (Jeffrey L. Whitten, 2006 :45). Menurut James Alter (1992) dalam buku *Informasi Sistem: A Management Perspective*, mendefinisikan sistem informasi sebagai kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi (Mulyanto, 2009 : 28).

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk mendapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan (Sutabri, 2005 :42).

Definisi dari sistem informasi yang telah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa sistem informasi merupakan komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis dan mendistribusikan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Definisi sistem informasi diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 2 Definisi Sistem Informasi
(Sumber: Mulyanto, 2009 : 30)

E. Pengadaan Barang dan Jasa

1. Definisi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengertian pengadaann barang/jasa menurut Perpres No.4 Tahun 2015, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementrian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Intitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Barang adalah benda dalam bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Pengertian lain yang di jelaskan oleh Rocky Marthun SH,MH bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara sewa kelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi atau peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen sesuai dengan penugasan kuasa pengguna anggaran.

2. Fungsi Pengadaan

Pengadaan merupakan segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, pendapat ini dikemukakan oleh H.Subagya M.S (1994) didalam bukunya. Termasuk di dalamnya usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi.

Fungsi pengadaan ini dilakukan proses perencanaan dan penentuan kebutuhan, serta rencana pembiayaan dari fungsi penganggaran. Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian, tetapi didasarkan atas pilihan berbagai *alternative* dengan berpedoman pada prinsip *alternative*

mana yang paling praktis, efisien dan efektif. Pengadaan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian
- b. Penyewaan
- c. Peminjaman
- d. Pemberian (hibah)
- e. Penukaran
- f. Pembuatan
- g. Perbaikan

3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi dan akuntabilitas (Budiharjo Hardjowijono dan Hayie Muhammad, 2008).

a. Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

b. Efektif

Prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

c. Persaingan Sehat

Prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

d. Terbuka

Prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

e. Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

f. Tidak Diskriminatif

Prinsip tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

g. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggung jawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 5 butir a sampai yang terkait pelaksanaannya pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang (seperti kolusi) dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

4. Metode *Procurement* (Pengadaan Barang)

Perusahaan pasti menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk dan jasa yang tergantung apa dan dimana mereka membeli, kuantitas yang diperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai dan sebagainya (Turban,2010:251). Metode *procurement* antara lain yaitu:

- a. Membeli dari manufaktur, penjual grosir atau pengecer dari katalog-katalog mereka dan adanya negosiasi.
- b. Membeli melalui katalog yang terhubung dengan memeriksa katalog penjual atau membeli melalui mall-mall industri.
- c. Membeli melalui katalog pembeli internal dimana perusahaan menyetujui katalog-katalog vendor termasuk kesepakatan harga.
- d. Mengadakan penawaran tender dari sistem dimana pemasok bersaing dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian dalam jumlah besar.
- e. Membeli dari situs pelelangan dimana organisasi berpartisipasi sebagai salah satu pembeli.
- f. Bergabung dengan suatu kelompok sistem pembeli dimana memeriksa permintaan partisipasi, menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok ini dapat menegosiasikan harga.

- g. Berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan, sehingga dapat mengurangi persediaan, *stock out* dan mempertinggi ketepatan pengiriman.

5. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan umum pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara ketentuan pengadaan barang/jasa dan kebijakan-kebijakan disektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa (Ramli, 2014:21) sebagaimana diatur dalam Perpres Pasal 111 No.54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 19, sebagai berikut :

- a. Peningkatan Penggunaan Produksi Barang/Jasa dalam Negeri, yang sarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional.
- b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri alat material khusus (almatsus) dalam negeri.
- c. Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil, dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
- e. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.

- f. Peningkatan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa.
- g. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- h. Penumbuh kembangan peran usaha nasional.
- i. Penumbuh kembangan industri kreatif, inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri.
- j. Memanfaatkan sarana prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- k. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia.
- l. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementerian, lembaga, satuan kerja pemerintah daerah atau institusi lainnya kepada masyarakat luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan informasi status atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang diteliti agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. Penggolongan jenis penelitian sangat bergantung dari sudut mana suatu penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:14). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti akan menganalisis tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep).

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dapat membatasi penelitian agar tidak melebar terlalu luas, sehingga lebih terkonsentrasi pada inti-inti yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep:
 - a. Keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.
 - b. Kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem.
 - c. Tingkat kesalahan pencatatan dan perhitungan informasi.
 - d. Kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem.
 - e. Relevansi yang menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.
 - f. Ketercapaian sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep:
 - a. Pendukung
 1. Sumber daya manusia
 2. Sarana dan Prasarana
 - a. Ruang Front Office

- b. Ruang Bidding
 - c. Ruang Pelatihan
 - d. Ruang Server
- b. Penghambat
1. Akses data
 2. Maintenance Sistem
 3. Habisnya batas upload berkas
 4. Ketidak Pahamana Mengakses

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian ini lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sumenep dan situs penelitian terletak di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berada di Jl. Dr.Cipto No. 33 Kabupaten Sumenep.

Pemilihan lokasi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dijalankan oleh Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep. Alasan lainnya karena sistem ini merupakan program pemerintah yang sudah lama dijalankan seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, sehingga efektivitas sistem ini sangat perlu diperhatikan apakah tujuan dan sasarannya sudah tercapai atau belum. Sistem ini juga akan memberikan dampak kesinambungan yang baik antara pemerintah, kantor layanan pengadaan dan masyarakat yang

menggunakan layanan tersebut sehingga menarik untuk diteliti keefektivasannya secara mendalam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Menurut Lofland yang dikutip Moleong (2014 : 157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain”. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2014:224). Sumber data primer pada penelitian ini berupa catatan hasil wawancara yang penulis lakukan. Selain itu penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu :

- a. Ketua LPSE Kabupaten Sumenep
- b. Masyarakat

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung terhadap pengumpul data (Sugiyono, 2014:224). Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa berkas-berkas yang berasal dari kantor LPSE Kabupaten Sumenep, dan hasil pengelolaan lebih lanjut dari

data primer yang disajikan dalam bentuk lain. Peneliti juga menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat menunjang hasil penelitian. Lihat halaman 58-74

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data Sugiyono (2014:224). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi atau data yang merupakan tingkah laku non verba objek yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan. Dengan adanya observasi ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung di kantor LPSE Kabupaten Sumenep dan kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus peneliti yang diperoleh dari informan. Lihat halaman 102-105

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data, yang mana peneliti berhadapan langsung dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai judul penelitian ini. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban dan pertanyaan. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur, dimana wawancara dilaksanakan secara terencana dengan pedoman pada

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Informan sendiri meliputi Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep Bapak Fariz Aulia Utomo, S.STP, M.Si dan Masyarakat khususnya kalangan kontraktor yang menggunakan layanan LPSE Kabupaten Sumenep Bapak Rizky, Bapak Sufianto, Bapak Imam.

3. Dokumen

Dokumen merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan objek atau permasalahan penelitian. Dalam rangka menguatkan data yang diperoleh maka setiap kegiatan penelitian dan observasi penelitian langsung melakukan proses pencatatan terhadap data atau informasi yang diperoleh, kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian. Lihat halaman 58-74

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono, 2011:223). Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian belum dapat dikembangkan sebelum masalah dan fokus peneliti jelas. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, *“the researcher is the key instrument”* (peneliti adalah kunci dalam kuanlitatif). Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

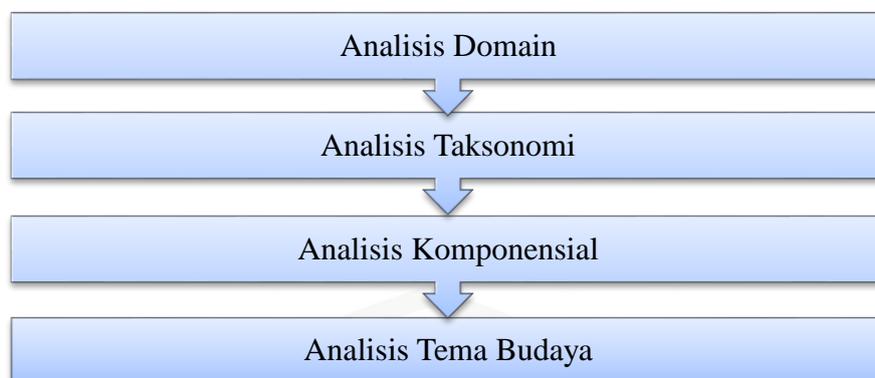
1. Peneliti sendiri dalam melakukan suatu penelitian yang akan dilkakukan sendiri tanpa diwakilkan orang lain. Selain itu juga menggunakan panca

indera untuk melihat, mengamati dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman Wawancara, yaitu merupakan sarana dalam instrumen penelitian yang memberikan pedoman untuk mempermudah proses wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan pada responden, yang mana hal ini digunakan sebagai petunjuk dalam melakukan wawancara.
3. Catatan lapangan, yaitu merupakan instrumen penelitian yang beberapa hukum catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi urain yang bersifat non verbal yang diperoleh selama penelitian. Buku catatan ini digunakan karena tidak mungkin peneliti dapat memahami sekaligus mengingat keseluruhan pertanyaan yang telah dikemukakan oleh narasumber selama wawancara.
4. Dokumentasi, yakni dalam melakukan dokumentasi peneliti harus menggunakan peralatan penunjang diantaranya *handphone* (HP) dan juga buku catatan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Bodgan dan Biklen dalam Moelong,2005:248).



Gambar 3 Tahapan Analisis Data Model Spradley
Sumber: Memahami Penelitian Kualitatif Sugiyono, (2011:255)

Penelitian ini, peneliti menggunakan model spradley. Penelitian kualitatif spradley memiliki empat tahapan yaitu: analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema budaya. Berikut merupakan penjelasan dari keempat tahap tersebut:

1. Analisis Domain

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Analisis domain pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil observasi lokasi penelitian yaitu kantor LPSE Kabupaten Sumenep, wawancara dengan pihak LPSE Kabupaten Sumenep, dan studi dokumen. Hasilnya berupa gambaran secara umum mengenai keadaan dan situasi sosial LPSE Kabupaten Sumenep. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh masih dipermukaan dan belum mendalam, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti.

2. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai lebih terperinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Pengumpulan data dapat dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi lebih banyak. Analisis taksonomi pada penelitian ini setelah peneliti melakukan analisis domain, akan ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial tertentu. Analisis taksonomi dalam penelitian ini domain yang telah ditemukan akan menjadi fokus penelitian, yaitu efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.

3. Analisis Komponensial

Dalam analisis komponensial kesamaan domain bukanlah menjadi hal yang diorganisasikan, melainkan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara terseleksi. Analisis taksonomi yang diuraikan adalah domain yang telah ditetapkan menjadi fokus penelitian. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa dan serumpun. Analisis komponensial pada penelitian ini dari domain Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa

pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep yaitu Keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem; Kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem; Tingkat kesalahan pencatatan dan perhitungan informasi; Kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem; Ketercapaian sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa. Sedangkan pada domain Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep yaitu pendukung dan penghambat.

4. Analisis Tema Budaya

Analisis tema budaya yang diuraikan adalah hubungan antar domain. Menurut Sugiyono (2011:256) pada tahap ini aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Sehingga pada bagian ini yang diperlukan adalah mencari hubungan antar domain sehingga mampu menentukan hubungan secara keseluruhan. Analisis tema budaya jika dilihat dari hubungan antar domain dalam penelitian ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan sistem informasi dapat menunjang efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura yang memiliki luas wilayah 2.093,47 km yang didiami oleh 1.042.312 jiwa. Sebelum tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumenep diperintah oleh adipati (Rato atau Raja dalam konteks masyarakat lokal Madura) dibawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, beliau memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintah kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapusnya sistem kswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten sumenep dibawah pemerintah langsung *Nederland Indische Regening*, sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan *regent*. Namun perlu diketahui, dari tahun 1883-1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsawan dalem Keraton Sumenep.

a. Visi Kabupaten Sumenep

SUPER MANTAP (Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, adil dan Profesional).

b. Misi Kabupaten Sumenep

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usah serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing ditingkat regional dan nasional.
2. Mengembangkan pengelolaan SDA dalam rangka mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.
3. Peningkatan pembangunan di wilayah kepulauan agar perkembangannya semakin seimbang dengan kondisi wilayah daratan.
4. Menyempurnakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya mampu bersaing ditingkat regional, nasional, dan bahkan internasional.
5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merata dan berkualitas, khususnya dibidang pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan serta pemukiman.

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang profesional dan konsisten dalam penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan dan berwibawa.

Luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2,093,43 km yang didiami oleh 1.042.312 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduk adalah Kecamatan Kabupaten Sumenep yakni 2.543 jiwa/km, dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduk adalah Kec. Batuan yakni 446 jiwa/km.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep di bentuk untuk menjamin kelancaran dan menjaga kelangsungan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta untuk melaksanakan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomer 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pada tahun 2011 tepatnya bulan juli Pemerintah Kabupaten Sumenep membentuk Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep. Penanggung jawa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep dengan Ketua LPSE Kabupaten Bapak Fariz Aulia Utomo, S.STP, M.Si , Penanggung jawab bagian Verifikator Bapak Agus Dwi Saputra dan Penanggung jawab bagian Helpdesk Bapak Aviv Siswoyo, SE . Layanan Pengadaam Secara

Elektornik (LPSE) merupakan unit kerja yang dibentuk pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE). LPSE Kabupaten Sumenep dibentuk untuk memfasilitasi ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Hingga akhir 2017, LPSE Kabupaten Sumenep telah memfasilitasi sebanyak 883 paket lelang pengadaan barang/jasa Kabupaten Sumenep. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE Sumenep dapat diakses disitus web resmi LPSE Kabupaten Sumenep yaitu: <http://lpse.sumenepkab.go.id/eproc>.

The screenshot shows the official website of the Local Procurement System (LPSE) of Kabupaten Sumenep in 2018. The page layout includes a header with the year 2018 and the LPSE logo, a navigation menu, and a sidebar with various services. The main content area features a 'Procurement' section with a table listing tender packages.

No	Nama Paket	Instansi	HPS	Tanggal Download
1	Normalisasi dan Rehab. Sungai Anjuk	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	1 M	28 Jan - 1 Feb 2018
2	Normalisasi dan Rehab. Sungai Ambat	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	750 jt	28 Jan - 1 Feb 2018
3	Perencanaan Teknis Pembangunan Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) + GTT P. Giliraja (Lanjutan)	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	82 jt	26 Jan - 31 Jan 2018
4	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Tiang Oktagonal Lengkap (Kabel+Lampu dll) (Pajak Rokok)	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	88,6 jt	26 Jan - 31 Jan 2018
5	Pengawasan Pembangunan saluran drainase Jl. Kartini - Jati Emas Kali Patrian	Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	144 jt	26 Jan - 31 Jan 2018

Gambar 4 Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep 2018
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

a. Visi dan Misi LPSE Kabupaten Sumenep

LPSE Kabupaten Sumenep juga mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

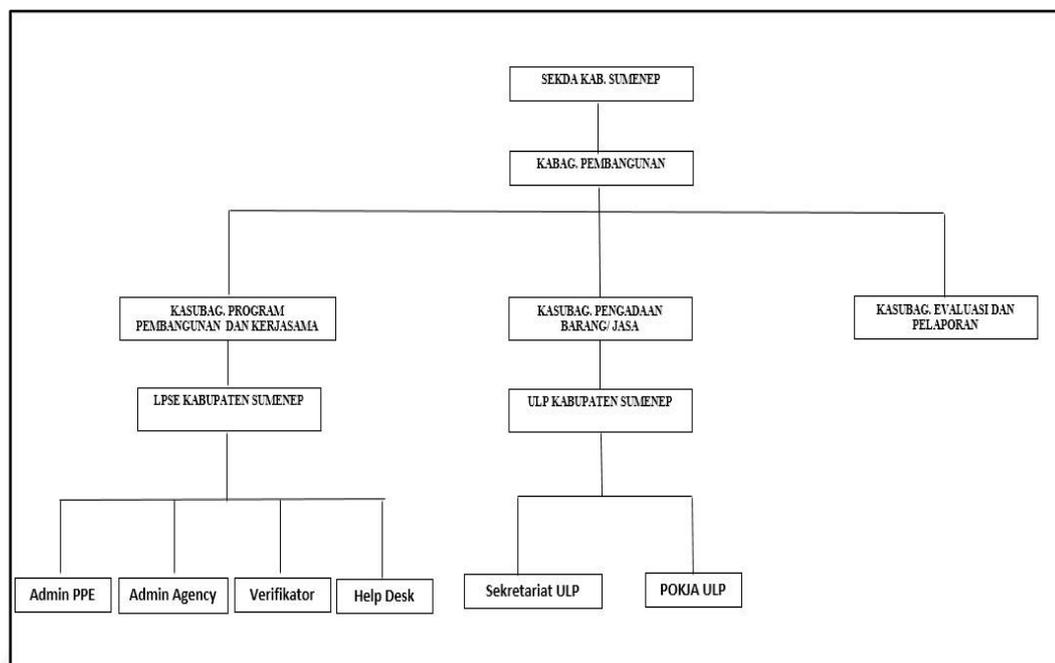
Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

b. Misi

1. Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien.
2. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang bedaya saing.
3. Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegrasi dalam pengadaan.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada suatu instansi atau perusahaan dapat memberikan suatu gambaran mengenai kejelasan sebuah tanggung jawab, kejelasan kedudukan, serta kejelasan akan uraian tugas yang harus dijalankan. Dalam hal ini, LPSE Kabupaten Sumenep tidak berdiri sendiri tetapi berada dibawah Kepala Bagian Pembangunan yang dibagi menjadi tiga Kepala Subbagian. Berikut struktur organisasi dari Kantor LPSE Kabupaten Sumenep ditunjukkan pada gambar 5:



Gambar 5 Struktur Organisasi LPSE Kabupaten Sumenep 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Struktur) 2018

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang bertujuan melihat perkembangan atau pencapaian LPSE yang ada diseluruh indonesia dengan mewajibkan mencapai 17 standarisasi yang telah ditentukan. Untuk LPSE Kabupaten Sumenep telah mencapai 17 standarisasi yang tidak langsung diperoleh dengan waktu yang sama tetapi menunggu dua semester untuk mencapai 17 standarisasi yang telah ditentukan oleh LKPP, untuk semester pertama LPSE Sumenep mendapatkan 10 standarisasi dan semester kedua mendapatkan 7 standarisasi. Dengan melengkapi 17 standarisasi tersebut dapat dilihat bawah LPSE Sumenep mengalami pencapaian dan perkembangan yang diharapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

c. Pengoperasian Sistem SPSE

1) Pendaftaran *User Id* Penyedia Barang / Jasa

Untuk dapat mengikuti lelang melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), terlebih dahulu Penyedia harus mendaftar *online* untuk mendapatkan *user id* untuk *login* kedalam sistem. Pendaftaran *user id* penyedia barang/jasa ditunjukkan pada gambar 6 sebagai berikut:

ELAMAT DATANG DI LPSE ANGGKATAH UDARA

Pengumuman Lelang Seluruh Indonesia
www.inaproc.lkpp.go.id

WHISTLEBLOWING SYSTEM
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

MONEV OL

Standar Dokumen Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik
Total Pengunjung: 17.608

Login Penyedia

Pengumuman Upload RUP | UPGRADE SPSE versi 3.5 | fitur terbaru SPSE versi 3.5

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perubahan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu **mendaftar sebagai penyedia barang/jasa**. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.

Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas. Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.

e-Procurement
LELANG SECARA ELEKTRONIK

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Simulasi Pengadaan Jasa Konsultan Bisnis Travel Dinas Pariwisata Provinsi Bali	LKPP	4,5 M	8 Jan - 9 Feb 2013
2	PENGADAAN PANSER	KORPS POLRI	BRIMOB 999 jt	21 Jan - 28 Jan 2013
3	Pengadaan Sangkar Burung 53a	LKPP	695 jt	3 Aug - 4 Aug 2014
4	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 57a	LKPP	475 jt	3 Aug - 4 Aug 2014

Gambar 6 *User Interface* Halaman Pendaftaran *User Id* 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Klik tautan (*link*) “mendaftar sebagai penyedia barang/jasa” untuk masuk ke halaman pendaftaran *e-mail* penyedia barang/jasa.

Sebelum melakukan pendaftaran ke LPSE, kami perlu memastikan alamat email Anda.
Pastikan alamat email Anda benar.

Alamat email

Selain itu, silakan download form di bawah ini untuk keperluan verifikasi.

1. Download **Formulir Pendaftaran** (Form_Penyedia.xls).
2. Download **Formulir Keikutsertaan** (Formulir_Keikutsertaan.doc).

Langkah berikutnya akan kami sampaikan lewat email.

Gambar 7 User Interface Halaman Pendaftaran E-mail 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

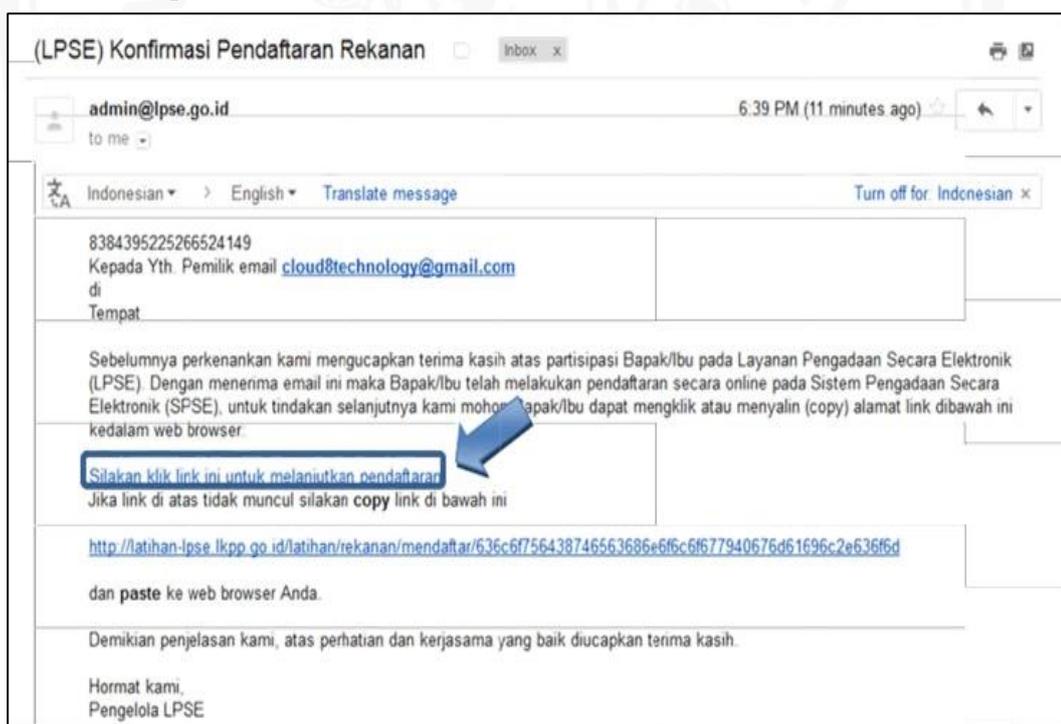
Masukan alamat *e-mail* perusahaan yang akan didaftarkan di LPSE. *E-mail* yang digunakan untuk pendaftaran harus *e-mail* yang aktif dan *valid*. Pengelola *e-mail* perusahaan sebaiknya adalah direktur atau pemilik perusahaan, hal ini untuk menghindarkan penyalahgunaan alamat *e-mail* yang terdaftar. Pada saat mendaftarkan alamat *e-mail*, penyedia dapat mengunduh (*download*) formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan. Formulir tersebut diisi dan kemudian dicetak dan dibawa pada saat penyedia barang/jasa melakukan verifikasi berkas di LPSE. Setelah alamat *e-mail* diisi, kemudian klik tombol



Gambar 8 User Interface Halaman Konfirmasi E-mail 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Selanjutnya penyedia akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran di *e-mail* yang didaftarkan. Penyedia dapat mengecek *e-mail* dari LPSE di *inbox* atau di *spam e-mail* terdaftar.



Gambar 9 User Interface Halaman E-mail 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

E-mail tersebut terdapat tautan (*link*), kemudian klik *link* untuk melanjutkan pengisian formulir pendaftaran *online*.

Pendaftaran - 2

User ID ** CLOUDSTECH

Password *****

Password (Verifikasi) *****

Nama Perusahaan * CLOUD8 TECHNOLOGY

NPWP * 01.423.234.2-423.000 Format : xxx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

Nomor Pengukuhan PKP

Bentuk Usaha * PT

Alamat * JAKARTA

Kabupaten/Kota * Jakarta Selatan (Kota)

Telepon * 0218482255

Fax 0218482255

Mobile Phone

Kode Pos 12345

Email cloud8technology@gmail.com

Web Site www.cloud8technology.co.id

Kantor Cabang ? Tidak Ya

* Data ini harus diisi

** User ID akan digunakan untuk login ke website ini, gunakan nama yang mudah diingat.

1. Lengkapi persyaratan berikut ini :

- KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan (fotokopi)
- NPWP (fotokopi)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK)/ijin usaha sesuai bidang masing-masing (fotokopi)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (fotokopi)
- Formulir Keikutsertaan (Formulir_Keikutsertaan.doc) dalam sistem e-procurement nasional untuk penyedia barang/jasa
- Print Formulir Pendaftaran (Form_Penyedia.xls) yang telah diisi lengkap dan masukkan ke dalam amplop tertutup disertai dengan dokumen penunjang

2. Serahkan berkas-berkas diatas ke Kantor LPSE dengan membawa **dokumen asli**

Mendaftar...

Gambar 10 User Interface Halaman Pengisian Pendaftaran Online 2018
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Data yang dapat diisikan pada formulir *online* adalah sebagai berikut :

- User ID* : Adalah kode nama yang akan digunakan untuk masuk/login ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan *user id* yang mudah diingat.

- b. *Password* : Adalah *password* yang akan digunakan untuk masuk/*login* ke dalam aplikasi SPSE. Gunakan huruf atau angka atau kombinasi keduanya yang mudah diingat oleh pengguna.
- c. *Password* (Verifikasi) : Adalah kolom isian untuk memastikan bahwa *password* yang dimasukkan adalah sesuai dengan yang diinginkan.
- d. Nama Perusahaan : Adalah nama dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- e. NPWP : Adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- f. Nomor Pengukuhan PKP : Adalah nomor pengukuhan dari PKP milik perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- g. Bentuk Usaha : Adalah bentuk usaha dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- h. Alamat : Adalah alamat dari perusahaan sesuai dengan NPWP.
- i. Kabupaten/Kota : Adalah nama Kabupaten/Kota tempat perusahaan sesuai dengan NPWP.
- j. Telepon : Adalah nomor telepon dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- k. Fax : Adalah nomor *faxsimili* dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- l. *Mobile Phone* : Adalah nomor telepon selular dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.

- m. Kode Pos : Adalah kode pos alamat dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- n. *Email* : adalah alamat surat elektronik/surel (*email*) dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia; *Website*, adalah alamat *website* dari perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia.
- o. Kantor Cabang : Jika perusahaan yang mendaftar sebagai penyedia merupakan sebuah kantor cabang, isikan 'Ya'. Jika sebaliknya, isikan 'Tidak'.

Setelah melengkapi data isian tersebut klik tombol dan akan tampil halaman “Pendaftaran Sukses”.

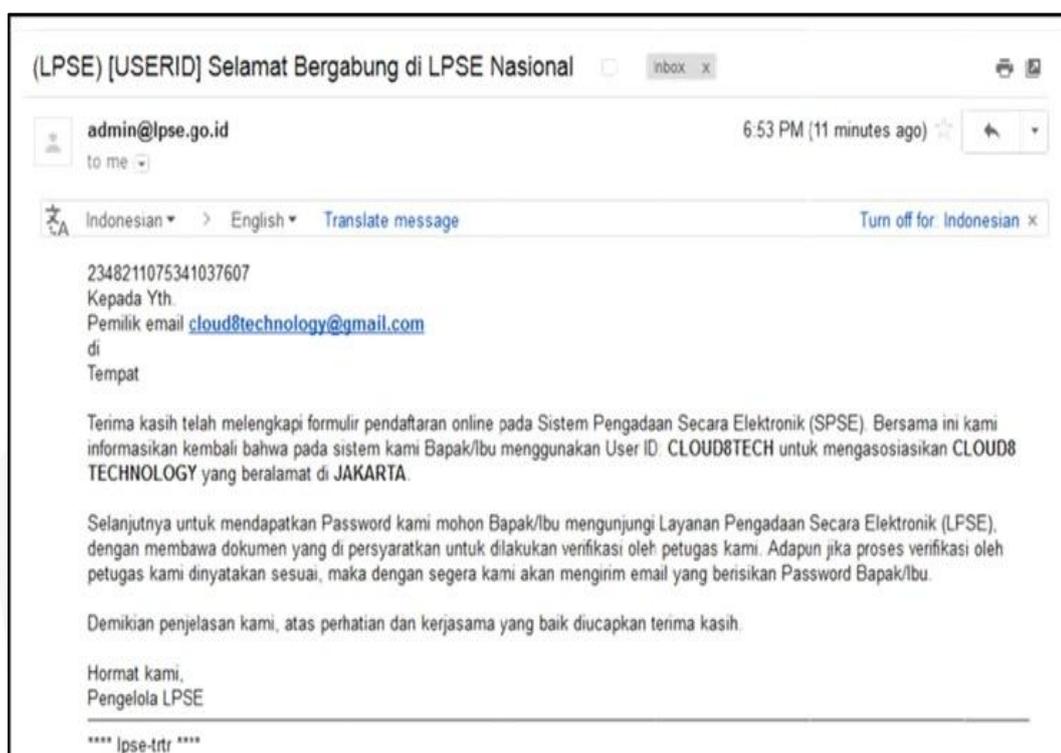


Gambar 11 User Interface Halaman Pendaftaran Sukses 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Setelah ada konfirmasi di *e-mail*, maka penyedia harus datang ke LPSE untuk melakukan verifikasi berkas di LPSE. Setelah penyedia melakukan verifikasi berkas di LPSE dan telah disetujui, maka dengan demikian *user id* & *password* yang dibuat ketika mengisi formulir *online* dapat digunakan

untuk *login* di LPSE. Sebelum penyedia melakukan verifikasi berkas *user id* dan *password* yang dibuat belum dapat digunakan untuk *login* dan mengikuti lelang.



Gambar 12 User Interface Halaman E-mail 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

2) Agregasi Data Penyedia (ADP)

ADP adalah sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu Penyedia barang/jasa yang terdaftar disatu LPSE dapat *login* dan mengikuti pelelangan di LPSE lain tanpa harus melakukan registrasi dan verifikasi lagi disetiap LPSE (*single sign-on*). Informasi ADP dapat diakses di <http://inaproc.lkpp.go.id/agregasi>. Halaman Aktivasi ADP dibedakan menjadi 3 bentuk sebagai berikut :

a. Aktivasi Penyedia Terdaftar di satu LPSE

Apabila Penyedia hanya terdaftar di salah satu LPSE maka akan tampil data penyedia yang akan diaktivasi. Periksa data tersebut lalu klik tombol

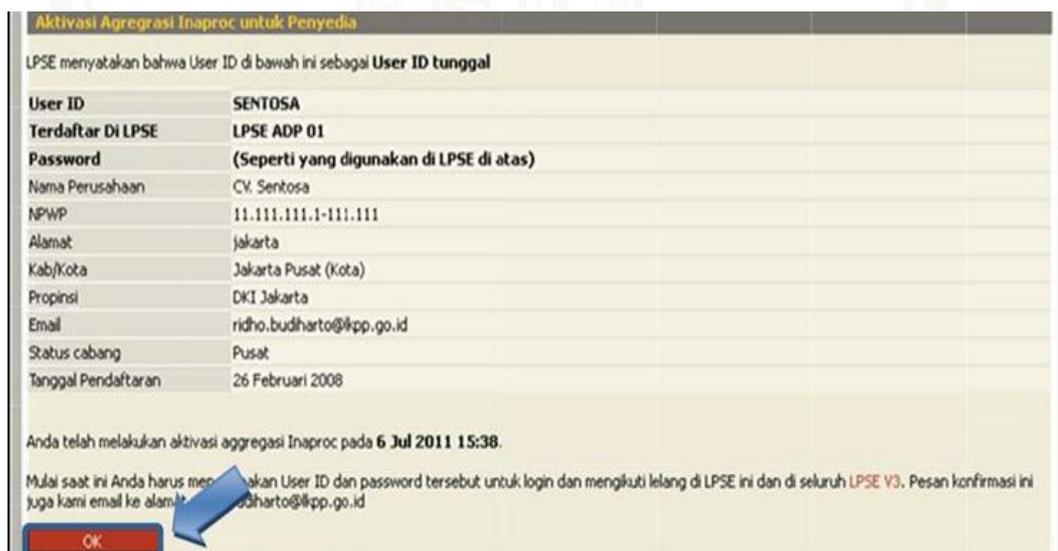
“Lakukan Aktivasi”



Gambar 13 User Interface Halaman Aktivasi 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Kemudian akan tampil konfirmasi bahwa aktivasi telah berhasil dilakukan.



Gambar 14 User Interface Halaman Aktivasi Berhasil 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Selanjutnya klik tombol “OK”, untuk kembali ke halaman *Home Penyedia*.

b. Aktivasi Penyedia yang terdaftar di beberapa LPSE

Apabila Penyedia terdaftar di beberapa LPSE maka akan tampil data Penyedia lokal yang akan di ganti. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk *log in* dengan menggunakan *user id* tunggal.

Aktivasi Agregasi Inaproc untuk Penyedia

Sistem Agregasi Inaproc telah mengidentifikasi bahwa User ID Anda:

Account Nomor 1

User ID	SENTOSA
Email	ridho.budiharto@kpp.go.id
Nama Perusahaan	CV. Sentosa
Alamat	Jakarta
Status	User ID yang akan dinonaktifkan

Merujuk ke perusahaan yang sama dengan yang telah terdaftar sebagai berikut:

Account Nomor 2

User ID	SENTOSA
Email	ridho.budiharto@kpp.go.id
Terdaftar di	LPSE ADP 01
Nama Perusahaan	CV. Sentosa
Alamat	Jakarta
Status	User ID Tunggal

Untuk melakukan Aktivasi Agregasi Inaproc, sistem mensyaratkan bahwa satu perusahaan hanya dapat memiliki satu **User ID Tunggal**. Sistem Agregasi Inaproc telah memilih **Account Nomor 2** sebagai **User ID Tunggal** sedangkan **Account Nomor 1** akan dinonaktifkan setelah Anda melakukan aktivasi ini.

Aktivasi dilakukan dengan memasukkan password dari **Account Nomor 2**

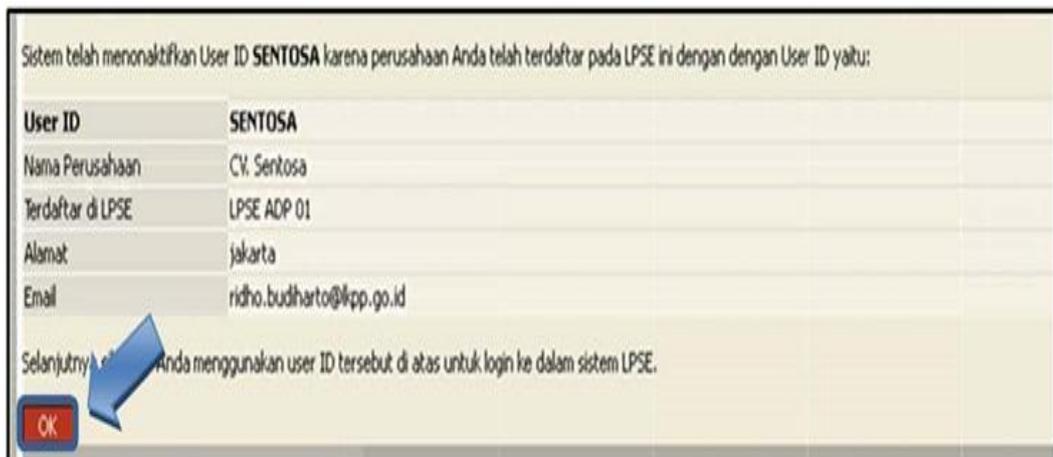
Password

Jika Anda belum menyetor password tersebut, silakan menghubungi penanggung jawab account tersebut dan Anda dapat menunda aktivasi. Untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini dapat menghubungi email helpdesk-lpse@kpp.go.id.

Gambar 15 User Interface Halaman Aktivasi Penyedia 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

User id Penyedia yang tergantikan dengan *user id* tunggal akan dinonaktifkan. Apabila Penyedia *login* dengan *user id* tersebut maka akan tampil notifikasi bahwa *user id* tersebut telah dinonaktifkan dan diganti dengan *user id* tunggal.



Gambar 16 User Interface Halaman Nonaktifkan User Id 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

c. Aktivasi Penyedia dengan *user id* sama dengan penyedia lain

Apabila *user id* penyedia sama dengan penyedia lain maka akan tampil notifikasi bahwa *user id* yang di gunakan harus diganti. Isi *user id* baru lalu klik tombol “**Check User Id**”. Apabila *user id* yang baru dapat digunakan, klik tombol “**Lakukan Aktivasi**”.



Gambar 17 User Interface Aktivasi Penyedia dengan User Id sama 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

3) Penjelasan Fungsi dan Fitur

a. Menu *Home*

Menu ini berisi informasi statistik lelang yang pernah diikuti dan status lelang yang diikuti. Terdapat juga identitas digital yang merupakan identitas penyedia yang telah dienkripsi secara otomatis oleh sistem. Selain itu juga terdapat link untuk mengunduh Aplikasi Pengamanan Dokumen (Apendo) peserta yang berfungsi untuk mengenkripsi dokumen penawaran.



Gambar 18 User Interface Halaman Home2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

b. Menu Data Penyedia

Menu ini terdiri dari beberapa sub menu yang berisi form isian untuk data penyedia mulai dari data umum, identitas perusahaan, ijin usaha, akta, pemilik, pengurus, tenaga ahli, peralatan, pengalaman, neraca, sampai dengan pajak.



Gambar 19 User Interface Halaman Menu Data Penyedia 2018
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

c. Menu Semua Lelang Baru

Menu ini berisi informasi lelang baru yang dapat diikuti oleh Penyedia.



Gambar 20 User Interface Halaman Menu Lelang Baru 2018
 Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Pada halaman lelang baru, lelang yang tampil pada halaman ini adalah paket lelang yang pada saat tanggal dan waktu tersebut pada tahap pengumuman lelang. Jika penyedia barang/jasa sudah mendaftar sebagai peserta lelang, maka secara otomatis nama paket lelang tersebut akan pindah ke halaman “*Home*” pada tabel lelang yang diikuti.

d. Menu *inbox*

Menu ini berisi informasi *copy* konfirmasi atau notifikasi yang dikirim dari sistem ke *e-mail* penyedia. Selain itu terdapat informasi dari panitia yang menyatakan bahwa adanya kekurangan dokumen kualifikasi yang dikirim oleh peserta (khusus untuk metode pra kualifikasi).



Date	Subject
07 Februari 2013 10:51	(LPSE) Perubahan Jadwal Lelang
07 Februari 2013 10:51	(LPSE) Perubahan Jadwal Lelang
07 Februari 2013 10:51	(LPSE) Perubahan Jadwal Lelang
05 Februari 2013 15:51	(LPSE) Pengumuman Pembatalan Lelang
05 Februari 2013 15:45	(LPSE) Pengumuman Pembatalan Lelang
05 Februari 2013 15:24	(LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang
05 Februari 2013 13:21	(LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang
05 Februari 2013 13:18	(LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang
01 Februari 2013 19:50	(LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang

Gambar 21 User Interface Halaman Inbox 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

e. Menu Catatan/ Log Akses

Menu ini berisi informasi catatan akses ke dalam aplikasi dari *user* penyedia.



Gambar 22 User Interface Halaman Menu Log Akses 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

f. Menu Ganti Password

Menu ini digunakan untuk mengubah *password* sesuai yang diinginkan untuk keperluan keamanan dan kemudahan mengingat.



Gambar 23 User Interface Halaman Menu Ganti Password 2018

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Website Resmi LPSE Kabupaten Sumenep) 2018

Password Lama : Adalah password lama dari akses login Panitia

Password Baru : Adalah password baru yang diinginkan

Ulangi Password : Adalah untuk memastikan password baru yang diinginkan

Klik tombol “**Ganti**” untuk proses mengganti password.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep

Efektivitas merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang diinginkan. Dengan adanya efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa ini dapat memudahkan semua orang mengakses dan mendapatkan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga di jelaskan oleh Bapak Faris Aulia Utomo selaku ketua LPSE Kabupaten Sumenep. Berikut ini hasil wawancara penelitian dengan beliau.

“Layanan Pengadaan Secara Elektronik merupakan program pemerintah, LPSE Sumenep sendiri baru berjalan di tahun 2011 yang bertujuan untuk lebih efektif dan efisien dalam mengikuti pendaftaran lelang yang diadakan oleh pemerintah Kab. Sumenep dan keterbukaan untuk publik agar bisa mendapatkan informasi dari layanan tersebut walaupun bukan dari peserta lelang” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Setelah memahami apa yang responden jelaskan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang

dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan mewujudkan keadilan (*non discriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan Bara/Jasa Pemerintah.

a. Keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem.

Keamanan data pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pengadaan barang/jasa guna mengatasi ilegal akses dan kerusakan pada sistem. Dalam hal ini LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua LPSE Kabupaten Sumenep dalam hasil wawancara dengan Bapak Faris tentang keamanan data, tingkat kemampuan sistem mengatasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem, sebagai berikut :

“ Untuk tingkat keamanan data sendiri LKPP bekerja sama dengan lembaga sandi negara untuk mengamankan data dari peserta lelang yang masuk. Mengenai *illegal acces* LKPP memilih *E-Control* yang fungsinya untuk mengontrol semua kegiatan yang dilakukan oleh LPSE Sumenep dan untuk mengatasi kerusakan sistem LPSE Sumenep mempunyai 2 server dan hardist Internal yang secara otomatis *mbackup* ketika terjadi kerusakan” (Wawancara

dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara diatas dapat di pahami bahwa data yang masuk kedalam sistem LPSE Sumenep keamanan data sudah pasti terjaga selain pihak LPSE selaku pengelola tidak dapat diakses oleh orang lain dan sudah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara. Untuk mencegah terjadinya *ilegal access* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai server pusat mempunyai *E-Control* yang berfungsi untuk memonitoring semua kegiatan yang dilakun oleh LPSE Kabupaten Sumenep jika ada hal yang menjanggal pihak LKPP dengan tegas akan memberikan peringatan. Untuk mencegah terjadi kerusakan server pengelola menyediakan 2 sever dan 1 hardist Internal untuk *mbackup* jika terjadi kerusakan pada server utama di LPSE Sumenep. Server yang ada di LPSE Sumenep merupana server *client* dimana sever utama tetap berada di Lembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

b. Kecepatan dan ketepatan infomasi dalam pemakaian sistem

Kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem ini berkaitan dengan indikator waktu, dimana semua aktivitas dalam sistem pengadaan barang/jasa harus tersampaikan dengan cepat dan akurat guna untuk mendukung akses sistem. Hasil wawancara dengan Bapak Fariz tentang kecepatan dan ketepatan infomasi dalam pemakaian sistem, sebagai berikut :

“ Semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta lelang semuanya sudah tercatat didalam log LPSE Sumenep seperti Pemasukan dokumen, waktu terahir pemasukan,daftar lelang, penetapan pemenang lelang semua sudah ada didalam sistem tersebut dan untuk kecepatan sistem LPSE Sumenep menggunakan ISP ICON+

layanan Internet Fo Internet Dedicated 1:1 5 Mbps untuk mendukung akses sistem bagi pengguna yang akan menggunakan sistem LPSE Sumenep”. (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara diatas dapat dipahami bahwa semua infomasi mengenai pengadaan barang/jasa yang akan dilelang sudah berada didalam sistem LPSE Sumenep. Peserta lelang dapat ngecek langsung berkas apa saja yang diperlu untuk mengikuti lelang yang sudah berada dalam sistem dan semua aktifitas dari pemasukan data kualifikasi, pemasukan dokumen penawaran, pengumuman pemenang lelang semua sudah berada didalam sistem LPSE Sumenep. Dengan adanya sistem ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang timbul dengan alasanya kurangnya infomasi dari pihak LPSE Kabupaten Sumenep untuk peserta lelang dan LPSE Sendiri menggunakan kecepatan sistem yang paling baik agar ketika peserta lelang menggunakan sistem LPSE tidak ada kendala saat masuk kedalam sistem.

c. Tingkat pencatatan dan perhitungan informasi

Penggunaan Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik diharapkan dapat menghasilkan tingkat pencatatan dan perhitungan informasi yang akurat agar dapat dilakukan lelang secara elektronik. Hasil wawanca dengan Bapak Fariz tentang tingkat pencatatan dan perhitungan informasi, sebagai berikut :

“ Untuk pencatatan dan perhitungan infomasi yang ada di sistem LPSE Sumenep semua Pokja (kelompok kerja) yang mengatur dan dimasukan kedalam SPSE” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara diatas dapat dipahami bawah pencatatan dan perhitungan infomasi bukan tanggung jawab LPSE karena fungsi LPSE disini adalah sebagai sistem. Untuk pencatatan dan perhintungan Pokja yang mengatur, selain pencatatan dan perhitungan fungsi Pokja adalah sebagai panitia lelang yang di tugaskan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menyetujui usulan yang diusulkan oleh SKPD agar dapat dimasukan kedalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang selanjutnya dapat dilakukan lelang secara elektronik.

d. Kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem

Kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem harus terus diperbaharui agar emua aktivitas yang bersangkutan dengan pengadaan barang/jasa dapat tersampaikan kepada masyarakat umum ataupun peserta lelang. Hasil wawancara dengan Bpk Fariz tentang kelengkapan isi informasi yang di hasilkan sistem, sebagai berikut:

“Di dalam sistem LPSE semua informasi sudah tersedia seperti pengumuman pengadaan, berita pengadaan, *log in* untuk penyedia dan non-penyedia, tentang LPSE Sumenep, kontak yang bisa dihubungi, regulasi semua sudah tersedia dan terbuka untuk peserta lelang maupun masyarakat” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara Dari hasil diatas dapat dipahami bahwa semua informasi yang ada didalam sistem LPSE sudah sangat lengkap, dimana tujuan agar masyakat juga bisa mendapatkan infomasi mengenai pengadaan barang dan jasa walapun bukan perseta lelang. Selain sebagai ketebukaan infomasi

dengan adanya sistem secara elektronik saat ini diharapkan semua aktifitas yang bersangkutan dengan pengadaan barang/jasa lebih efektif dan efisien.

e. Relevansi yang menunjuk kesesuai dan manfaat laporan yang dihasilkan

Penerapan sistem dalam aktivitas pengadaan barang/jasa dapat menunjukkan kesesuaian antara informasi yang disajikan pihak LPSE Kabupaten Sumenep dengan informasi yang diperoleh masyarakat umum. Serta manfaat dari penerapan sistem pengadaan barang/jasa menghasilkan laporan yang relevan. Hasil wawancara dengan Bapak Fariz tentang relevansi yang menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasil, sebagai berikut :

“Didalam Sistem LPSE Sumenep informasi yang dihasilkan seperti nama paket lelang, pemenang lelang dan para peserta lelang sudah ada didalam sistem ketika peserta lelang ingin mengecek kembali dan sudah sesuai atau tidak realita di luar sistem dengan informasi yang ada didalam sistem LPSE Sumenep” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara diatas dapat dipahami bahwa manfaat laporan yang dihasilkan oleh sistem LPSE Sumenep merupakan sebuah informasi bagi para peserta lelang yang ingin mengecek kembali nama paket lelang yang telah ditentukan sebagai pemenang lelang maupun para peserta lelang yang gugur didalam pelangan tersebut tujuan tidak lain adalah untuk mengecek kembali informasi yang ada diluar sistem sudah sama atau tidak dengan informasi yang ada didalam sistem tersebut.

f. Ketercapaian sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa

Penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik diharapkan dapat mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa. Hasil wawancara dengan Bapak Fariz tentang ketecepaian sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut:

“Sistem LPSE Sumenep saat ini sudah mendapatkan 17 standarisasi yang telah ditentukan LKPP selaku lembaga pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan LPSE seluruh Indonesia” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Wawancara diatas dapat dipahami bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak sekedar hanya layanan yang dibentuk oleh pemerintah tetapi layanan tersebut juga harus mempunyai standarisasi yang bertujuan untuk melihat perkembangan LPSE yang ada di indonesia husunya LPSE Kabupaten Sumenep yang saat ini sudah mencapai 17 standarisasi yang telah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP). LPSE Kabupaten Sumenep harus melalui dua semester untuk mendapatkan 17 stadarisasi dimana untuk semester pertama LPSE Sumenep mendapatkan 10 standarisasi dan semester kedua mendapatkan 7 standarisasi membuat LPSE Kabupaten Sumenep mencapai standarisasi yang telah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengandaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep

Dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Sumenep tentunya ada faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.

a. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan suatu sistem khususnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang seimbang. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Fariz selaku Ketua LPSE Sumenep :

“Sumber daya manusia sangat menentukan efektivitas pelaksanaan, pengelolaan, transaksi yang ada didalam kantor LPSE Sumenep” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

. Dengan sumber daya manusia yang seimbang diharapkan pekerjaan yang ada di kantor LPSE Sumenep dapat berjalan dengan efektif dan efisien khususnya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sarana dan prasarana merupakan hal penting untuk mencapai efektivitas dalam penerapannya. Sesuai yang

dikemukakan oleh Bapak Fariz selaku Ketua LPSE Kabupaten Sumenep :

“Sarana prasarana yang ada didalam Kantor LPSE Sumenep merupakan alat pendukung untuk memperlancar aktifitas yang ada didalam kantor, seperti ruang front office, ruang bulding, ruang pelatihan dan ruang server” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Tanpa adanya sarana dan prasana semua aktifitas Pengadaan Barang/Jasa tida dapat berjalan dengan baik. Untuk melancarkan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pihak LPSE Sumenep menyediakan sarana dan Prasarana sebagai berikut:

a) Ruang *Front Office*

Ruang *Front Office* merupakan ruangan terdepan kantor LPSE Kabupaten Sumenep, dimana *front office* menggambarkan *image* dari LPSE Kabupaten Sumenep dan tempat bertemunya sebuah perusahaan/instansi dengan pengguna jasa.

b) Ruang *Bidding*

Untuk mendukung terwujudnya proses lelang yang transparan, kompetitif dan efisien Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep menyediakan fasilitas ruang *bidding* yang dapat digunakan penyedia barang dan jasa untuk mengupload dokumen penawaran. Ruang *bidding* tersebut sudah di fasilitasi jaringan yang sangat kuat untuk meminimalisir kegagalan pada saat megupload dokumen penawaran.

c) Ruang Pelatihan

Ruang pelatihan merupakan fasilitas pendukung yang ada di LPSE Kabupaten Sumenep. Ruangan tersebut digunakan untuk pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Penyedia, Pokja dan PPK apabila SPSE mengalami pembaharuan sistem. Ruang pelatihan ini juga digunakan untuk melatih penyedia yang baru bergabung dengan LPSE Kabupaten Sumenep yang tujuannya agar penyedia yang baru dapat mengoperasikan sistem LPSE secara fasih dan tidak mengalami kesulitan pada saat mengakses sistem tersebut.

d) Ruang Server

Ruang Server merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan aplikasi, *database*, perangkat penting LPSE Kabupaten Sumenep. Ruang server ini tidak bisa sembarang orang bisa masuk, karena ruang tersebut dilengkapi dengan akses keamanan yang sangat ketat, hanya karyawan LPSE yang dapat masuk ke dalam ruang server. Didalam ruangan tersebut ada dua server, dimana untuk server ke dua merupakan *server backup* dari server pertama yang tujuannya jika server utama mengalami kerusakan server kedua otomatis bekerja.

b. Faktor Penghambat

1. Kecepatan Akses Internet

Kecepatan Akses Internet merupakan jaringan komunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lain yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan, yang menjadi faktor

penghambat di sini dalam akses data. Seperti disampaikan oleh Bapak Faris sebagai berikut :

“Kecepatan akses internet disini sulitnya para penyedia dalam mengupload file penawaran lelang yang sangat besar ukurannya karena kecepatan internet yang di pakai oleh penyedia sangat lambat membuat terjadinya gagal saat melakukan upload file penawaran” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Untuk mengantisipasi hal tersebut LPSE Sumenep memfasilitas *bidding room* didalam kantor untuk memfasilitasi para penyedia atau para peserta lelang jika mengalami permasalahan tersebut.

2. *Maintenance* Sistem

Maintenance Sistem adalah pelayanan yang diberikan setelah penerapan sistem dilakukan hal ini bertujuan agar sistem yang telah diterapkan dapat berjalan sesuai fungsinya. *Maintenance* sistem menjadi kendala bagi penyedia, seperti disampaikan oleh Bapak Fariz sebagai berikut :

“*Maintenance* sistem yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah selaku penanggung jawab LPSE selalu tiba-tiba menyebabkan para peserta lelang kesulitan dalam mengakses situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Mengatasi hal tersebut pihak LPSE Kabupaten Sumenep berkoordinasi dengan Pokja (Kelompok Kerja) selaku panitia lelang memberitahukan bawah pihak LKPP melakukan *maintance* tujuannya agar batas waktu pemasukan berkas penawaran lelang bisa diperbaharui dari waktu sebelum *maintance* dilakukan.

3. Habisnya batas *upload* berkas

Sistem Pengadaan Secara Elektronik merupakan sistem yang dapat diakses oleh penyedia. Kurang telitinya penyedia, habisnya batas *upload* berkas menjadi kendala tersendiri, seperti di sampaikan oleh Bapak Fariz sebagai berikut :

“Ketika penyedia tidak mengecek kembali kapan terahir waktu *upload* yang ada didalam sistem. Pada saat waktu sudah berahir penyedia meminta bantuan pihak LPSE untuk meng*upload* berkas tersebut, setelah ditinjau kembali batas waktu *upload* berkas sudah habis” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Pihak LPSE tidak bisa membantu karna LPSE sendiri hanya sebuah sistem, semua yang mengatur tentang pelelangan adalah Pokja (kelompok kerja), Pokja sendiri tidak bisa membantu karena semua kesalahan dilakukan penyedia bukan kesalah Pokja (kelompok kerja) selaku panitia lelang.

4. Ketidak pahaman mengakses

Banyak penyedia kesulitan dalam mengakses sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik karena ada pembaruan untuk menambah kualitas sistem tersebut dan menjadi kendala bagi penyedia. Seperti disampaikan oleh Bapak Fariz sebagai berikut :

“Setiap ada pembaruan sistem banyak penyedia kesulitan untuk mengakses Layanan Pengadaan Secara Elektronik, pembaruan yang dilakuan oleh LKPP bertujuan agar Layanan Pengadaan Secara Elektronik semakin berkembang” (Wawancara dengan Ketua LPSE di Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, Sumenep 1 Februari 2018)

Menyikapi permasalahan tersebut pihak LPSE Kabupaten Sumenep mengadakan pelatihan untuk para penyedia jika sistem mengalami pembaruan agar tidak ada lagi permasalahan tersebut. Untuk penyedia yang baru menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pihak LPSE Sumenep memberikan pelatihan khusus dan memberikan buku pedoman pengoprasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep

Efektivitas merupakan suatu proses yang dikerjakan dengan hasil akhir yang harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Keberhasilan efektivitas sistem informasi ini juga harus melihat dari indikator-indikatornya. Indikator ini mencakup berbagai macam yang harus di perhatikan dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa LPSE Kabupaten Sumenep. Menurut Bodnar (2000:700) menjabarkan indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

a. Keamanan Data, Tingkat Kemampuan Sistem dalam Mengatasi

Illegal Access dan Kerusakan pada Sistem

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa dibuat untuk mempermudah aktifitas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam penerapannya harus melihat indikator efektivitas sistem (Bodnar, 2000:700) hal pertama yang paling penting adalah indikator keamanan data,

tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi *illegal acces* dan kerusakan pada sistem. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menaungi Layanan Pengadaan barang Jasa (LPSE) telah bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara untuk meningkatkan keamanan data yang ada di LPSE seluruh indonesia khususnya LPSE Kabupaten Sumenep.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) juga memiliki *E-Control* yang fungsinya untuk memonitoring semua kegiatan yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sumenep yang tujuan untuk mencegah terjadinya *illegal acces* yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sumenep. Untuk mencegah terjadinya kerusakan server LPSE Kabupaten menyediakan dua server dan satu hardist eksternal yang bertujuan jika terjadi kerusakan pada server pertama otomatis server kedua (*server backup*) yang berkerja secara otomatis dan ketika kedua sever mengalami kerusakan hardist internal yang bekerja.

b. Kecepatan dan Ketepatan Infomasi dalam Pemakaian Sistem

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa menurut Bodnar (2000:700) juga harus melihat indikator kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem. Untuk kecepatan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sumenep menggunakan ISP ICON+ Layanan Internet Fo *Internet Dedicated* 1:1 5 Mbps untuk mendukung kecepatan akses sistem bagi penyedia yang akan menggunakan sistem LPSE Sumenep. Dalam Sistem Layangan Pengadaan Secara Elektronik terdapat Log dimana berfungsi untuk mencatat segala aktifitas

penyedia seperti pemasukan dokumen, waktu terahir pemasukan, daftar lelang semua sudah tercatat dalam sistem LPSE Kabupaten Sumenep.

c. Tingkat Pencacatan dan Perhitungan Informasi

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa menurut Bodnar (2000:700) juga harus melihat indikator tingkat pencatatan dan perhitungan informasi karena hal tersebut sangat penting. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) disini ada sebuah sistem, untuk pencatatan dan perhitungan informasi Pokja (kelompok kerja) yang mengatur karena semua yang berkaitan dengan pengadaan lelang termasuk pencatatan dan perhitungan informasi Pokja (Kelompok Kerja) yang mengatur dan dimasukkan kedalam sistem LPSE.

d. Kelengkapan Isi Informasi yang Dihasilkan Sistem

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa menurut Bodnar (2000:700) harus melihat indikator kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem. Karena informasi yang ada didalam sistem sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan penyedia pengadaan barang dan jasa, didalam sistem LPSE Sumenep sendiri informasi yang di hasil sangat lengkap seperti pengumuman pengadaan, log in untuk penyedia dan non penyedia, kontak yang dapat dihubungi dan pengumuman pemenang lelang semua sudah ada didalam Sistem LPSE Sumenep.

e. Relevansi yang Menunjuk Kesesuaian dan Manfaat Laporan yang Dihasilkan

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa menurut Bodnar (2000:700) harus melihat indikator relevansi kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan didalam sistem. Didalam sistem LPSE Sumenep informasi yang dihasilkan sistem harus sama dengan kenyataan yang ada diluar sistem karena semua sudah tercatat didalam sistem seperti paket lelang yang dikeluarkan, pemenang lelang dan peserta lelang karena bukan hanya penyedia yang dapat melihat hasil tersebut tetapi masyarakat juga dapat melihat hasil dari informasi yang ada didalam sistem LPSE Sumenep.

f. Ketercapaian Sistem Sesuai dengan Tujuan Dibentuknya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa merupakan program pemerintah untuk mempermudah aktifitas pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menaungi LPSE memiliki standarisasi untuk dimiliki oleh LPSE seluruh indonesia khususnya LPSE Kabupaten Sumenep. Ada 17 standarisasi yang harus dimiliki LPSE Kabupaten Sumenep untuk semester pertama mendapat 10 standarisasi dan semester kedua 7 standarisasi membuat LPSE Kabupaten Sumenep telah memiliki 17 standarisasi yang telah ditentukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Dengan ditentukannya standarisasi tersebut LPSE tidak hanya sekedar layanan yang dibentuk oleh pemerintah

tetapi layanan tersebut juga harus memiliki standarisasi yang bertujuan melihat perkembangan LPSE yang ada di Indonesia khususnya LPSE Kabupaten Sumenep.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep

Dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Sumenep tentunya ada faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten Sumenep.

a. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Efektivitas penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Sumenep tidak bisa berjalan secara efektif tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang seimbang. Seperti disampaikan oleh (Akadun, 2009:142) bahwa sumber daya manusia yang mampu membangun sistem pengelolaan informasi, mengoperasikan, serta memperbaiki sistem. Peran Sumber daya manusia sangat menentukan aktivitas pelaksanaan yang ada didalam kantor LPSE Kabupaten Sumenep. Dengan sumber daya manusia yang seimbang diharapkan pekerjaan yang ada di kantor LPSE Kabupaten Sumenep dapat berjalan dengan efektif dan efisien khususnya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

2. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa khususnya pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep tidak bisa berjalan efektif dan efisien tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. Seperti disampaikan oleh (akadun, 2009:142) bawah semua sarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak diperlukan untuk mendukung pengelolaan, dan penyaluran informasi. Untuk mencapai efektivitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa, pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep menyediakan sarana dan Prasarana sebagai berikut:

a) Ruang *Front Office*

Ruang *Front Office* merupakan ruangan terdepan kantor LPSE Kabupaten Sumenep, dimana *front office* menggambarkan *image* dari LPSE Kabupaten Sumenep dan tempat bertemunya sebuah perusahaan/instansi dengan pengguna jasa.

b) Ruang *Bidding*

Penyediaan fasilitas ruang bidding pada LPSE Kabupaten Sumenep untuk mendukung terwujudnya proses lelang yang transparan, kompetitif dan efisien Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep menyediakan fasilitas ruang *bidding* yang dapat digunakan penyedia barang dan jasa untuk mengupload dokumen penawaran. Ruang *bidding* tersebut sudah di fasilitasi jaringan yang

sangat kuat untuk meminimalisir kegagalan pada saat *megupload* dokumen penawaran.

c) Ruang Pelatihan

Ruang pelatihan merupakan fasilitas pendukung yang ada di LPSE Kabupaten Sumenep. Ruangan tersebut digunakan untuk pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi Penyedia, Pokja dan PPK apabila SPSE mengalami pembaharuan sistem. Ruang pelatihan ini juga digunakan untuk melatih penyedia yang baru bergabung dengan LPSE Kabupaten Sumenep yang tujuannya agar penyedia yang baru dapat mengoperasikan sistem LPSE secara fasih dan tidak mengalami kesulitan pada saat mengakses sistem tersebut.

d) Ruang Server

Ruang Server merupakan ruangan yang digunakan untuk menyimpan aplikasi, *database*, perangkat penting LPSE Kabupaten Sumenep. Ruang server ini tidak bisa sembarang orang bisa masuk, karena ruang tersebut di lengkapi dengan akses keamanan yang sangat ketat, hanya karyawan LPSE yang dapat masuk ke dalam ruang server. Didalam ruangan tersebut ada dua sever, dimana untuk server ke dua merupakan *server backup* dari sever pertama yang tujuannya jika server utama mengalami kerusakan server kedua otomatis bekerja.

b. Faktor Penghambat

1. Kecepatan Akses Internet

Kecepatan Akses Internet merupakan hambatan bagi banyak penyedia pada waktu *upload* file penawaran lelang yang sangat besar ukurannya karena kecepatan internet yang dipakai oleh penyedia sangat lambat membuat terjadi kegagalan saat melakukan *upload file* penawaran. Untuk mengantisipasi terjadi hal tersebut LPSE Sumenep mempersilahkan para penyedia untuk menggunakan fasilitas *bidding room* didalam kantor LPSE Sumenep untuk *upload* file penawaran ketika mengalami kegagalan. Untuk Penyedia bisa juga meningkatkan kecepatan internet yang di pakai dengan cara mengupdate kecepatan Mbps dengan minimal kecepatann 5 Mbps agar tidak terjadi kegagalan saat melakukan upload file penawaran.

2. Maintenance Sistem

Maintenance Sistem adalah pelayanan yang diberikan setelah penerapan sistem dilakukan hal ini bertujuan agar sistem yang telah diterapkan dapat berjalan sesuai fungsinya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) selaku penanggung jawab LPSE dalam melakukan *maintenance* selalu tiba-tiba membuat sistem LPSE Sumenep tidak dapat diakses menjadi kendala bagi penyedia saat ingin mengakses. Untuk mengatasi hal tersebut pihak LPSE Kabupaten Sumenep harus berkordinasi dengan pokja selaku panitia lelang bertujuan agar batas waktu pemasukan

prakualifikasi dan pemasukan penawaran lelang bisa diperbaharui dari waktu yang ditetapkan sebelumnya.

3. Habisnya batas *upload* berkas

Kesalahan penyedia tidak teliti dalam melihat informasi yang ada di sistem LPSE Sumenep menjadi hambatan tersendiri saat ingin meng*upload* file penawaran. Ketika waktu sudah berakhir penyedia meminta bantuan pihak LPSE untuk meng*upload* berkas tersebut, setelah ditinjau kembali batas waktu *upload* berkas sudah habis. Pihak LPSE tidak bisa membantu karena LPSE sendiri hanya sebuah sistem, semua yang mengatur tentang pelelangan adalah Pokja (kelompok kerja), Pokja sendiri tidak bisa membantu karena semua kesalahan dilakukan penyedia bukan kesalahan Pokja (kelompok kerja) selaku panitia lelang. Untuk mengatasi hal tersebut penyedia harus lebih teliti lagi dalam melihat jadwal lelang yang diikuti karena semua informasi lelang sudah ada didalam sistem LPSE Kabupaten Sumenep dan penyedia juga bisa memanfaatkan kalender handphone untuk dijadikan pengingat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

4. Ketidak pahaman mengakses

Ketidak pahaman mengakses menjadi hambatan bagi penyedia saat mengakses sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) karena ada pembaruan untuk menambah kualitas sistem tersebut. Setiap ada pembaruan sistem banyak penyedia kesulitan untuk mengakses, menyikapi hal tersebut pihak LPSE Kabupaten Sumenep mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk para penyedia apabila sistem mengalami pembaharuan dan pihak LPSE juga

bisa membuat tutorial penggunaan SPSE yang telah dipembaharui agar tidak ada lagi permasalahan tersebut. Untuk penyedia yang baru menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pihak LPSE Sumenep memberikan pelatihan khusus dan memberikan buku pedoman pengoprasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep, meliputi :

1. Penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada LPSE Sumenep telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Semenjak diterapkannya sistem ini mulai tahun 2011 segala bentuk terkait Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat di atasi.
2. Penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa memiliki faktor pendukung SDM pengelola yang seimbang karena dengan dukungan SDM pengelola yang seimbang menentukan efektivitas pelaksanaan yang ada didalam kantor LPSE Sumenep, faktor pendukung lainnya seperti sarana prasarana sangat lah penting karena melihat tanpa sarana prasarana penerapan sistem LPSE di kantor LPSE Sumenep tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Selain faktor pendukung penerapan sistem pengadaan barang dan jasa memiliki faktor penghambat seperti kecepatan akses internet, maintenance sistem, habisnya batas upload berkas, tidak pahaman mengakses membuat penerapan sistem pengadaan barang jasa pada kantor LPSE Sumenep tidak berjalan dengan baik.
3. Indikator efektivitas sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang telah dicapai oleh Kantor LPSE Kabupaten Sumenep setelah menerapkan sistem informasi berbasis teknologi berupa keamanan data, tingkat

kemampuan sistem dalam mengatasi illegal acces dan kerusakan pada sistem, kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian sistem, tingkat pencatatan dan perhitungan informasi, kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem, relevansi yang menunjukkan kesesuai dan manfaat laporan yang dihasilkan, ketercapain sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan *bandwidth* untuk mencegah apabila akses ke situs LPSE Kabupaten Sumenep mengalami kesulitan (*traffic jam*) dan meningkatkan versi aplikasi SPSE ke versi 4.2 untuk akses yang lebih optimal.
2. Perlunya penugasan pegawai LPSE Sumenep untuk mengikuti Management Training Administrasi System LPSE yang diselenggarakan oleh LKPP untuk meningkatkan keahlian dibidang Teknologi Informasi dan mengetahui perkembangan yang akan di lakukan LKPP selaku penanggung jawab Layanan Pengdaan Secara Elektronik (LPSE).
3. Perlu dilakukan *maintenance* secara berkala terhadap sistem informasi yang diterapkan oleh kantor LPSE Kabupaten Sumenep. Dengan cara mengupdate *bandwidth website*, agar semua informasi yang dipublikasikan dapat diterima oleh pengguna sistem informasi pengadaan barang dan jasa dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV.Afabeta
- Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bodnar, George William Hopwood. 2000. Sistem Infomasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Davis, Gordon B, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*, PT Pustaka Binamas Pressindo, Jakarta: 1999
- Davis, Gordon B, *Sistem Analisis dan Desain : Sebuah Strategi Riset Makro - Analisis , diTantangan dan Strategi Penelitian di Pengembangan Sistem*,WW Cotterman dan JA Senn (eds .) .Chichester , UK : John Wiley & Sons ,1992 , hlm 9-21.
- Hardjowijono., dan Muhammad. 2008. Daftar Simak Monitoring Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Prosedur Pengadaan Barang/Jasa. Tersedia di, www.lgsp.or.id/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=2008
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016, dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government; Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Tekonologi Digital*. Online Yogyakarta: Andi. Tersedia di: http://www.4shared.com/office/sAZy_zKB/REL_eBook-ElectronicGovernment.html.
- Investigasi , 2017. Di Duga Ada Permainan Lelang Tender, Kontraktor Demo Pemkab Sumenep. Tersedia melalui <<http://www.kabar-investigasi.com/2017/07/di-duga-ada-permainan-lelangtender.html?m=1>>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2017 pukul 18:04
- Jawapos , 2017. Forum Kontraktor Sumenep Curiga Proyek Dimonopi. Tersedia melalui<<http://www.jawapos.com/radarmadura/read/2017/07/25/3390/forum-kontraktor-sumenep-curiga-proyek-dimonopoli>>. Diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 21:08
- Lubis, Hari dan Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI.

- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto, Agus. 2009. Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Ramli, Samsul, *Buku Bacaan Wajib Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Cet-1 Jakarta : Visimedia, 2014
- Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju
- Subagya M S, *Manajemen Logistik*, 1994, cetakan keempat Jakarta : PT Gunung Agung
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutabri, Tata .2005. Sistem Informasi Manajemen.2005. Jakarta.
- Sutabri, Tata, SH.MM, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Penerbit :Andi.
- Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta: Kencana.
- Turban, Efraim dkk. 2004. Electronic Commerce: A Managerial Perspective.USA: Prentice Hall
- Undang Undang Nomer 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Wahyuni, S.(2012). *Qualitative Research Method*. Jakarta: Salemba Empat.
- Whitten, Jeffery L. 2006. Metode desain dan Analisis System. Yogyakarta:Andi

LAMPIRAN



Peneliti wawancara dengan Ketua LPSE Kabupaten Sumenep
Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018



Ruang Karyawan LPSE Kabupaten Sumenep
Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018



Ruang Front Office LPSE Kabupaten Sumenep
 Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018



Ruang Bidding LPSE Kabupaen Sumenep
 Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018



Sertifikat Standarisasi LPSE Kabupaten Sumenep
Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018



Sertifikat Standarisasi LPSE Kabupaten Sumenep
Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018





Ruang Pelatihan dan Pelatihan SPSE versi 4.2 LPSE Kabupaten Sumenep
Sumber : Data primer hasil observasi penelitian 2018


KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 19055 /UN10.F03/11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset

 Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
 Jl. Trunojoyo No.142 Kolor
 Sumenep

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Satria Agung Cahya

Alamat : Jl. Dr. Cipto Gg VII

NIM : 135030107113014

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Publik

Judul : Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep

Lamanya : 1 (satu) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 Desember 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Tim Teknologi Informasi & Komunikasi LPSE Kabupaten Sumenep

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

Surat Riser/Survey BANGKESBANGPOL





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 664977 - 662610 Fax. 662210
SUMENEP

Kode Pos 69417

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIZ AULIA UTOMO, S.STP, M.Si
 Jabatan : Kasubbag. Program Pembangunan dan Kerjasama
 Selaku Ketua LPSE Kabupaten Sumenep
 Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : SATRIA AGUNG CAHYA
 NIM : 135030107113014
 Fakultas : Ilmu Administrasi
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Telah selesai melakukan penelitian di kantor LPSE Kabupaten Sumenep selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN SUMENEP"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 01 Pebruari 2018

an. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
 Kasubbag. Program Pembangunan dan Kerjasama
 Selaku
 Ketua LPSE Kab. Sumenep

FARIZ AULIA UTOMO, S.STP, M.Si

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



Pedoman Wawancara :

1. Bagaimana keamanan data, tingkat kemampuan sistem dalam mengatasi illegal access dan kerusakan pada sistem LPSE Kabupaten Sumenep ?
3. Bagaimana kecepatan dan ketepatan informasi dalam pemakaian system LPSE Kabupaten Sumenep ?
4. Bagaimana tingkat kesalahan pencatatan dan perhitungan informasi yang ada di sistem LPSE Kabupaten Sumenep ?
5. Apa saja kelengkapan isi informasi yang dihasilkan sistem LPSE Kabupaten Sumenep ?
6. Bagaimana relevansi yang menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan sistem LPSE Kabupaten sumenep ?
7. Ketercapaian sistem sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa ?
8. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada kantor LPSE Kabupaten ?